

**REKONSTRUKSI REGULASI ENERGI NASIONAL DALAM
MELINDUNGI HAK RAKYAT ATAS ENERGI BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

(Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)

Disertasi



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar doktor dalam ilmu hukum**

Edi As'Adi, SH, MH

NIM: 11010111500004

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI REGULASI ENERGI NASIONAL DALAM
MELINDUNGI HAK RAKYAT ATAS ENERGI BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

(Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)

Oleh

Edi As'Adi, SH, MH

NIM: 11010111500004

Semarang, Agustus 2015

Telah diajukan pada ujian terbuka

oleh:

Tim Promotor

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr.Fx. Adji Samekto, SH,M.Hum
NIP;19620118 198703 1002

Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum
NIP: 19700202 199403 1001

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr.Fx. Adji Samekto, SH, M.Hum
NIP;19620118 198703 1002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi As'Adi
NIM : 11010111500004
Alamat di Semarang : Jl. Yos Sudarso No.25, Kab. Semarang
Asal Instansi : Tanjung Surya Gemilang.Co.Ltd, Jakarta & Universitas Empu
Thantular, Jakarta Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2015

Yang membuat

pernyataan,

Edi As'Adi
NIM: 11010111500004

ABSTRAK

Regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi berdasar kepada Pasal 33 UUD NRI 1945 dihadapkan pada fenomena ekonomi global yang cencerung liberal kapitalistik yakni melalui liberalisasi harga keekonomian energi minyak bumi. Situasi dilematis regulasi energi tersebut menjadi fokus studi ini. Asumsi tidak adanya konsistensi antara implementasi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi dengan praktik pembuatan hukum dan pelaksanaannya dalam bidang ini memotivasi penulis untuk mengungkap latar belakangnya dan merekonstruksi regulasi energi berbasis nilai keadilan sosial. Bagaimana fungsi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM saat ini; mengapa implementasi regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi, dan bagaimana konstruksi baru regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi di masa depan, adalah tiga problematic disertasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi dan bukti-bukti tentang pengingkaran regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi terhadap nilai keadilan sosial dan bahaya liberalisasi harga keekonomian energi BBM terhadap pemenuhan energi BBM, yang bermuara pada upaya untuk merekonstruksi regulasi energi nasional itu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman alternatif terhadap regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM.

Metode kualitatif-konstruktivisme dengan pendekatan *socio-legal* digunakan dalam penelitian ini. Penelusuran data mengikuti arus penelitian hermeneutic dan fenomenologis yang digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, dan memverifikasi serta menyajikan data. Teori mikro digunakan untuk menjelaskan fenomena temuan penelitian. Teori tersebut adalah Teori Hukum Progresif, Teori Interaksionalis Simbolis, dan Teori Kebijakan Publik. Teori Bekerjanya Hukum, Sibernetika digunakan dalam disertasi ini untuk menganalisis fenomena makro. Tujuan akhir kajian ini adalah konstruksi baru regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi.

Studi ini menyimpulkan (1) implementasi regulasi energi nasional saat ini cenderung mengingkari nilai keadilan sosial dan berpatoka kepada paham liberal sebagai rujukan pengelolaan energi, (2) implementasi regulasi energi nasional dalam upaya melindungi hak rakyat atas energi terkendala oleh belum adanya penafsiran yang jelas pada Pasal 33 (4) UUD NRI 145 menimbulkan multi tafsir dan bias, belum adanya undang-undang energi yang komprehensif, praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM membahayakan akses rakyat terhadap energi, (3) Melalui kerangka teori prismatic dari Fred W. Riggs, dialektika antara politik hukum ideal dan *existing* dapat membentuk regulasi energi nasional baru yang disebut regulasi energi nasional “prismatic progresif multidimensional”. Peraturan pelaksanaan UU Energi sektor Migas telah membuktikan adanya liberalisasi terselubung di dalamnya, atas dasar kesimpulan ini direkomendasikan agar MK dan MA menguji kembali UU Energi khususnya di sektor Migas dan Meningkatkan sosialisasi budaya hemat energi.

Keywords: Regulasi Energi, Liberalisasi, Hak Rakyat, Hukum Progresif, Rekonstruksi.

ABSTRACT

RINGKASAN

Pada hakikatnya negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang selalu dilandasi nilai keadilan sosial Pancasila serta berdasarkan kepada Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI 1945 sebagai kerangka acuannya, yaitu bahwa:

(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas *azas kekeluargaan*; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan **dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**, dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, idealnya implementasi pengaturan harga keekonomian energi BBM seyogyanya didasarkan kepada prinsip efisiensi berkeadilan, sebagaimana disebutkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2007, yaitu bahwa “*harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.*”

Dewasa ini, praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM cenderung masih berjalan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu bahwa pengaturan harga energi BBM dan Gas diserahkan kepada mekanisme pasar. Bila praktik liberalisasi tersebut terus dijalankan dikhawatirkan dapat mengancam hilangnya hak rakyat atas energi BBM dan menimbulkan ketidakadilan.

Berangkat dari konflik hukum di tengah praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM tersebut Mahkamah Konstitusi RI membatalkan Pasal 28 Ayat (2) UU Migas melalui putusan No. 002/PUU-I/2003 karena dianggap *inskonstitusional*. Walau demikian, di tataran praksis praktik tersebut masih dijalankan, yaitu melalui Pasal 72 Ayat (1) PP 36 tahun

2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 72 PP 30 tahun 2009 Tentang Perubahan PP 36 tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 4 dan 5 Perpres No.55 tahun 2005 Juncto Perpres No. 9 tahun 2006 juncto Pasal 1 angka 5 Perpres No. 71 tahun 2005.

Fakta hukum membuktikan bahwa selama ini telah terjadi liberalisasi hukum pada Pasal 28 Ayat (2) UU Migas yang dianggap *inkonstitusional*, namun kenyataannya masih diberlakukan oleh Pemerintah dan dijadikan rujukan dalam pengaturan harga keekonomian energi BBM. Ada dugaan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan tindakan yang cenderung mengabaikan hukum. Langkah pemerintah tersebut cenderung berdampak mengancam hak rakyat atas energi termasuk BBM serta dapat menimbulkan ketidakadilan.

Fakta sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi HEN cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi, dapat diperhatikan dari dinamika kenaikan harga BBM sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, di mana sejak berlakunya Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Migas, harga BBM cenderung diliberalisasi mengikuti ketentuan harga minyak di pasar bursa minyak internasional Singapura (MOPS).

Fakta fisik menunjukkan bahwa implementasi fungsi HEN belum dapat melindungi hak rakyat atas energi, dapat dicermati melalui rendahnya tingkat produksi industri hulu minyak dalam negeri serta besarnya total nilai impor BBM mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, berikut ini : tahun 2003 impor BBM mencapai 137.126.653 kilo liter (KL), tahun 2004 impor BBM mencapai 148.489.589 KL lebih besar dari produksi BBM dalam negeri 400.486 ribu barel.¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa perdebatan tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM ini sangat penting dan laten untuk dikaji lebih

¹ *Statistik Minyak Bumi*, sumber: <http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Statistik/Statistik%20Minyak%20Bumi.pdf> dikutip 10 Februari 2013.

lanjut, sebagai pembatasan masalah dalam kajian ini diketengahkan tiga pokok masalah yang menjadi inti kajian, yaitu:

- a. Bagaimana fungsi regulasi energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi saat ini?
- b. Mengapa implementasi regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi?
- c. Bagaimana konstruksi baru regulasi energi nasional tentang pengaturan harga keekonomian BBM bersubsidi dalam melindungi hak rakyat atas energi di masa depan?

Kajian utama disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif, Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi” berisi variable-variabel pokok masalah yang akan dikaji lebih lanjut di dalam disertasi ini. Oleh karena itu, untuk menyingkap pokok masalah tersebut perlu dijelaskan makna dan definisi variabel-variabel tersebut.

Definisi Rekonstruksi menurut *Black Law Dictionary* adalah:

*The name commonly given to the process of reorganizing, by acts of congress and executive action, the governments of the states which had passed ordinances of secession, and of re-establishing their constitutional relations to the national government, restoring their representation in congress, and effecting the necessary changes in their internal government after the close of the civil war.*²

Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengembalian seperti semula.³

Alasan untuk melakukan rekonstruksi adalah satunya yaitu bahwa hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as aprocess, law in the making*) seperti yang dimaksudkan oleh Satjipto Rahardjo di dalam gagasan Hukum Progresif.⁴ Dalam pandangan Philippe Nonet dan

² Black Constitutions Law, 3d.Ed, Texas V, White 7 Wall.700, 19L.Ed.227 dalam reconstruction, www.thelawdictionary.org/ , disunting 21 Mei 2015.

³ Rekonstruksi, www.kbbi.web.id/ , disunting 21 Mei 2015.baca dalam Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang, tth, hlm. 183.

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif...Op.cit,hlm.33.

Philip Selznick, adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Regulasi dengan demikian dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Regulasi mencakup kegiatan menguji sejumlah strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari,⁵ yaitu dengan bantuan Teori Hukum Progresif yang memiliki asumsi hukum untuk manusia.⁶

Hak berarti kebebasan, kedaulatan, keistimewaan, kekuasaan, kelayakan, kewenangan, kewibawaan, prerogatif atau milik atau kepunyaan⁷ rakyat atas sumber-sumber produksi salah satunya sumber energi BBM yang menjadi modal penting bagi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan makna filosofis kata keekonomian yang tersebut di dalam azas-azas demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD NRI 1945 di atas, definisi harga keekonomian berkeadilan menurut Bambang Soesatyo, adalah hakikat, karena di dalamnya terkandung nilai keadilan atau *fairness* bagi produsen, negara, dan konsumen, Harga keekonomian juga mencerminkan adanya proteksi atau perlindungan terhadap konsumen oleh negara yang mengadopsi mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas yang berasaskan transparansi, harga keekonomian mestinya lebih mudah diwujudkan.⁸ Makna harga keekonomian berkeadilan dalam perspektif yuridis normatif disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU Energi tersebut menegaskan bahwa batasan makna nilai keekonomian berkeadilan adalah

Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/ biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah.

⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, terjemahan Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.119-120.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif...Ibid.*, hlm. 3-18.

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Ibid.*

⁸ Bambang Soesatyo, Harga Keekonomian dan Transportasi Perdagangan, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=10814&coid=2&caid=30&gid=2, disunting 11 Mei 2015.

Sejalan dengan penjelasan Pasal 7 (1) UU Energi di atas, Pasal 1 Ayat (31) Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional 2014 yang disahkan pada tanggal 28 Januari 2014, menegaskan mengenai batasan definisi keekonomian berkeadilan, yaitu bahwa:

(Harga) Keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi energi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan uraian definisi variabel-variabel pokok masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa batasan makna keekonomian atau efisiensi berkeadilan yang dianut dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia dapat diukur melalui tingkat kemampuan daya beli rakyat terhadap energi khususnya BBM dan kebutuhan hidup lainnya, seperti dikatakan oleh Richard A. Posner dalam prinsip Pareto Efisiensi.⁹

Produk hukum yang dimaksudkan adalah produk hukum yang mencerminkan karakter *prismatik progresif multidimensional*, artinya hukum energi nasional yang terbentuk di tengah tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi tersebut tetap kukuh dalam mengimplementasikan prinsip efisiensi berkeadilan yang merupakan dasar pijakan politik demokrasi ekonomi Indonesia yaitu Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945 atau mencerminkan nilai keadilan sosial dengan tetap memperhatikan hak-hak individu atau *prismatik*.

Selain itu, produk hukum tersebut mampu bertindak secara *progresif* sebagai katalisator dan mediator yang menjebatani berbagai partisipasi serta kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik setiap variabel-variabel yang mempengaruhi bekerjanya hukum, tujuannya yaitu agar dikemudian hari implementasi produk hukum tersebut tidak menimbulkan kegaduhan atau konflik hukum di tengah berbagai dimensi kehidupan masyarakat atau *multidimensional*, meskipun tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang harus diakui dan diterima sebagai konsekuensi bagi Indonesia sebagai anggota WTO.

⁹ Lihat Richard O. Zerbe Jr, *Economic Efficiency in Law and Economics*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, Massachusetts, USA, 2001, hlm.3

Model hukum energi yang berkarakter *prismatik progresif multidimensional* diharapkan dapat menjadi alat yang secara perlahan-lahan mampu menggeser (*mengingsutkan*) perilaku masyarakat yang berkarakter individualistis tradisional ke arah masyarakat prismatis yang dapat memberi anggotanya rasa kegembiraan, tantangan, kemajuan dan sebagainya serta jaminan kebahagiaan atau keselamatan yang tidak akan diperoleh anggota masyarakat dalam sistem memancar dan memusat.¹⁰

Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis ialah Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Teori Intraksionalis Simbolik Blumer, Teori Analisis Keekonomian Tentang Hukum Richard A. Posner, dan Teori Kebijakan Publik Wayne Parsons. Teori hukum progresif yang dipandang sebagai teori yang sedang mencari jati diri menekankan tujuan hukum pada tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, basis utamanya adalah *hukum untuk manusia* dan *keadilan di atas peraturan*.¹¹ Latar belakang kemunculan gagasan hukum progresif adalah sebagai koreksi terhadap realitas empirik atau keadaan hukum moderen pada masa orde lama yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga rentan untuk disimpangkan. Ketika itu hukum moderen bergeser (*ber-ingsut*) menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan saat itu, hukum moderen di abad sembilan belas dalam konteks Eropa Barat dirancang untuk melindungi dan menjamin kemerdekaan serta kebebasan individu atau liberalis dan individualistis sesuai ungkapan “*laissez faire laissez passer*” yang digagas oleh Adam Smith melalui bukunya berjudul , “*The Wealth of Nation*” (1776) melalui teori *invisible hand*. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹² Implementasi hukum di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh di luar faktor hukum, oleh karena itu hakikat hukum cenderung selalu dalam proses menjadi (*law as aprocess, law in the making*).¹³

¹⁰ Fred W. Riggs, *Administrasi Negara-negara Berkembang; Teori Masyarakat Prismatis*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 43.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif...Op.Cit*, hlm.22.

¹² *Loc.Cit*.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif...Op.Cit*, hlm.33.

Hukum energi nasional sebagai suatu sistem hukum yang mencakup substansi, struktur dan kultur hukum¹⁴ merupakan hasil formalisasi dan kristalisasi konflik dan persaingan kepentingan-kepentingan¹⁵ dari masing-masing variabel yang mempengaruhi bekerjanya hukum mulai dari pembuatan, penerapan dan penegakan di lapangan atau di alam empirik, maka hukum merupakan produk politik.¹⁶ Simmel mengatakan bahwa sesuatu yang empirik atau nyata adalah bagian-bagian dunia sosial yang sangat luas atau serpihan-serpihan kultur objektif,¹⁷ artinya setiap hukum memiliki struktur sosialnya sendiri yang berbeda.¹⁸ Konflik yang mewarnai bekerjanya hukum energi nasional di lapangan dalam melindungi hak rakyat atas energi khususnya terkait pengaturan harga keekonomian energi BBM bersubsidi sebagai bentuk fenomena sosial berupa perilaku yang mempola yang bersifat simbolik, perilaku yang penuh makna-makna tertentu.¹⁹

Teori Intraksionalis Simbolik Blumer sangat relevan disandingkan bersama-sama Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss dan Robert B. Siedman, Teori Sistem Hukum dan Teori Konflik Ralf Dahrendorf. Mengingat kajian disertasi ini menelaah keterkaitan hukum dalam konteks pengaturan harga keekonomian BBM, maka Teori Keekonomian dalam Hukum Ricard A. Posner dapat disandingkan dengan Teori Sibernetika Talcott Parsons dan Teori Black Box Kebijakan Publik David Easton.

Di dalam konteks Indonesia, dasar utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang merupakan pedoman bagi variabel-variabel atau lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum atau *legal policy*²⁰ dalam memproduksi sistem hukum energi nasional (HEN). tujuan negara juga sekaligus menjadi alat ukur terhadap implementasi fungsi hukum

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Prospective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, dalam terjemahan M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 18-19.

¹⁵ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006. hlm. 15.

¹⁶ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2009, hlm. 1, 5, 10.

¹⁷ George Ritzer, *The Postmodern Social Theory* dalam terjemahan Muhammad Taufik, *Teori Sosial Postmoderen*, Juxtapose Research and publication study club dan Kreasi Wacana, Bantul-Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

¹⁸ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Bantul-Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

¹⁹ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum...Ibid*, hlm. 25.

²⁰ Moh. Mahfud M.D., *Membangun...Ibid*, hlm. 16. baca juga dalam Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum...Ibid*, hlm. 2.

energi nasional agar tidak keluar atau menyimpang (deviasi) dari kerangka tujuan yang telah ditentukan di dalam tujuan negara atau ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²¹

Terkait dengan pembuatan hukum atau *legal policy* nasional yang saat ini dipengaruhi oleh tekanan globalisasi ekonomi yang cenderung membawa berbagai sistem ekonomi dunia yaitu libralis, individualis, kapitalistik ataupun sistem ekonomi sosialis dan komunis, Teori Hukum Prismatic Fred W. Riggs dan Teori Kebijakan Publik Wayne Parsons sangat relevan untuk menemukan model baru hukum energi nasional di masa depan yang sesuai dengan nilai keadilan sosial Pancasila.

Posisi titik berdiri (*standpoint*) para penstudi hukum, baik sebagai partisipan, pengamat, maupun kombinasi dari keduanya sangat menentukan metode berfikir yang digunakan.²² Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif²³ yang operasionalisasi penelitiannya didasarkan pada sudut pandang naturalistik (*naturalistic paradigm*)²⁴ sekaligus kukuh dengan pemahaman interpretif mengenai pengalaman manusia.²⁵

Francis Bacon mengatakan bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta, oleh karena itu pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang sejati.²⁶ Sejalan dengan Bacon, John Locke mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, akal ibarat kertas putih dan akan digambari oleh pengalaman tadi sehingga lahir ide. Dalam pandangan Thomas Hobbes diungkapkan bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan.²⁷

²¹Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum....Ibid*, LP3ES, Jakarta, hlm. 2.

²²Shidarta, *Pemetaan Aliran-aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Op.cit*.hlm 159.

²³Nelson dkk (1992, hlm.4) mendefinisikan Penelitian kualitatif merupakan bidang antar- disiplin, lintas-disiplin,dan kadang-kadang kontra-disiplin. Penelitian kualitatif menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu fisik. Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama, Lihat, Norman K Denzin dan Yvonna S.Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research...Op.cit*, hlm..5, lihat juga dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang HMN atas SDA...Ibid*, hlm.28

²⁴Suteki, *Ibid*, hlm.28

²⁵Suteki,*Ibid*, hlm. 5

²⁶Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 22.

²⁷Sudarto, *Ibid*, hlm. 22.

Selanjutnya, untuk memecahkan pokok masalah di atas digunakan Paradigma sebagai sistem kepercayaan dasar atau metafisika yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis.²⁸ Ide dasar Paradigma *Critical Legal Theory* adalah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan ekonomi, hukum tidaklah netral dan bebas nilai seperti dianut oleh mazhab positivisme atau legisme dogmatik, artinya bahwa proses pembuatan hukum meliputi pembuatan, penerapan sampai penegakannya selalu diwarnai pemihakan-pemihakan atau kepentingan-kepentingan.²⁹ Sekalipun dalam *liberal legal order* dibentuk keyakinan terhadap kenetralan, objektivitas, dan prediktabilitas dalam hukum.³⁰

Critical Legal Theory lahir dipelopori oleh Max Horkheimer, Theodore Adorno, dan Herbert Marcuse. Max Horkheimer lahir 14 Februari 1895 di Zuffenhausen dekat Stuttgart, teori kritis (*critical theory*) eksistensinya muncul di tahun 1923, disertasi Horkheimer berjudul *Kant's Critique of Judgment* menjadi acuan pemikiran di dalam *Frankfurt School*.³¹ Benang merah *Critical Studies* (Teori Kritis) ini sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Sigmund Freud (1856-1939), Kant, Hegel dan Weber.³²

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (atau studi sosiolegal) merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan ini sangat penting diterapkan di negara berkembang seperti halnya Indonesia, tujuannya adalah untuk

²⁸Norman K Denzin dan Yvonna S.Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research...Op.cit*, hlm.132.

²⁹Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm.119.

³⁰F.X. Adji Samekto, *Justice Not For All; Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 90-91. Lihat juga <http://www.law.Cornell.edu>, *Critical Legal Studies; An Overview*, Legal Information Institute Cornell Law School.

³¹Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sukolah Frankfurt*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.2-4. Baca juga dalam Adji Samekto, *Ilmu Hukum...Ibid*, hlm.84-96, baca juga dalam Adji Samekto, *Keterkaitan Kapitalisme....Ibid*, hlm.56-69.

³²Erlin Indiarti, *Menjadi Manusia Merdeka, Menggas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Rangka Dies Natalis Ke-44 Fakultas Hukum Undip, Semarang, 8 Januari 2001, hlm.20-21.

mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat³³ (dalam kajian ini bekerjanya atau efektifitas HEN dalam pengaturan harga keekonomian energi BBM. Pen).

Di dalam *Socio legal studies* dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk megkaji fenomena-fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks social, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada.³⁴ Definisi *socio legal studies* pernah dijelaskan oleh Wheeler dan Thomas, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal (yuridis normatif/dogmatik) terhadap hukum. Kata *socio* dalam *sociolegal studies* mempresentasi keterkaitan antara konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).³⁵ Karakteristik *socio legal studies* dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut: (1) studi *sociolegal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan), dan (2) studi *sociolegal* mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif *sociolegal* dan etnografi *sociolegal*.³⁶

Pendekatan yuridis normatif, filosofis dan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana konsistensi HEN ketika diimplementasikan dan dihadapkan kepada tekanan globalisasi ekonomi dan politik di era perdagangan bebas yang cenderung liberalis kapitalistik. Teori *Stufenbau* menjadi sangat penting diketengahkan dalam kajian ini untuk menemukan bukti ada atau tidaknya *inkonstitusional* dalam implementasi HEN terhadap UUD NRI 1945. Tipe atau jenis yang sesuai dengan kajian ini adalah penelitian *sosio legal*,

³³ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.174

³⁴ Sulistyowati Irianto, *Ibid*, hlm.174.

³⁵ Sulistyowati Irianto, *Ibid*, hlm.175.

³⁶ Sulistyowati Irianto, *Ibid*, hlm.178.

karena objek yang dikaji adalah hukum yang dikonstruksikan sebagai hasil perilaku masyarakat.³⁷

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian serta paradigma yang digunakan , maka spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif induktif, yaitu suatu penelitian untuk mendiskripsikan secara menyeluruh objek kajian yakni fungsi HEN dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi. Selanjutnya *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepskan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolis dan bertendensi *pro populus*.³⁸ Dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data skunder.

Sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dan Pasal 7 Ayat (1) UU Energi dan PP No. 79 Tahun 2014 di atas dalam perspektif Hukum Progresif, hukum energi nasional (HEN) sebagai sebuah sistem hukum idealnya digunakan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas Hukum Progresif menandakan bahwa “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*”, oleh karena itu hukum untuk manusia adalah sebagai asumsi dasar hukum progresif³⁹ yang hendaknya dapat ditanamkan dan disemaikan ke dalam bekerjanya hukum energi sampai di tataran praksis⁴⁰, termasuk dalam pengaturan harga keekonomian BBM yang sudah tidak memiliki landasan hukum di tataran implementasinya.

³⁷Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.51.

³⁸Soetandyo Wignjosoebroto,*Op.cit*, hlm. 200

³⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.2-17.

⁴⁰Biasanya hukum idealisme hukum tergeser oleh watak Sang penguasa yang menjadi bebas untuk menentukan dan mengikuti politik yang dibuatnya sendiri, dan tidak ada patokan atau watak kemanusiaan tertentu sebagai determinan, satu-satunya determinan adalah kebijakan (kebijaksanaan) yang dibuatnya dituangkan ke dalam hukum. Legalitas menjadi prinsip dasar tidak perlu memperhatikan legitimasi. Lihat Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2009, hlm.3.

Berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan dan gagasan Hukum Progresif tersebut seyogyanya praktik liberalisasi harga keekonomian yang selama ini dilegitimasi pemerintah melalui Implementasi Pasal 28 Ayat (2) UU Migas dan PP 36 Tahun 2004 juncto PP 30 Tahun 2009 perlahan-lahan mulai digeser (atau *diingsutkan*) atau direkonstruksi kepada pengaturan harga keekonomian energi BBM yang berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan sosial. Hal ini sesuai pedoman tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Pada perspektif ekonomi dan hukum permintaan dan penawaran (*demand and supply*), HEN dihadapkan kepada tekanan globalisasi ekonomi yang tidak dapat dihindarkan, rendahnya produksi minyak dalam negeri dan peningkatan konsumsi energi BBM Indonesia kepada negara-negara produsen minyak dunia mendorong pemerintah meningkatkan biaya subsidi impor BBM dari pasar bebas Asia di Singapura (*Mid Oil Platt's Singapore*). Lahirnya UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada rekomendasi Bank Dunia (BD) dan IMF saat penyerahan bantuan dana sebesar 43 miliar dolar AS untuk memulihkan krisis moneter 1997/1998. di dalam klausul *Letter of Intent (LoI)* 20 Januari 2000 di sebutkan bahwa pemerintah Indonesia dalam proses pembuatan hukum atau *law making process* energi nasional khususnya di sektor minyak dan gas bumi wajib segera distandarisasi sesuai sistem pasar bebas, yaitu:

Di sektor minyak dan gas, pemerintah sepakat untuk mengambil langkah-langkah berikut: mengganti undang-undang yang ada dengan perundang-undang baru yang moderen; melakukan restrukturisasi dan pembentukan kembali (*reforming*) Pertamina; menjamin agar ketentuan fiskal dan kebijakan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara global; **membuat agar harga jual produk domestik selalu berpatokan pada tingkat pasar dunia**; dan menetapkan kebijakan yang mendukung penggunaan energi domestik yang efisien dan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, wajar bila dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan No.002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, karena dianggap *inskonstitusional* atau

bertentangan dengan UUD NRI 1945, seperti disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No.30 tahun 2007 tentang Energi berada di bawah UUD NRI 1945. Seperti disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang bahwa secara normatif jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undang terdiri atas sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut penulis pembatalan Pasal 28 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas oleh MK tersebut semestinya juga membatalkan aturan di bawahnya baik di tataran implementasi PP 36 Tahun 2004 dengan perubahannya PP No. 30 Tahun 2009 dan di tataran praksis Peraturan Presiden No.55 tahun 2005 dan dalam perubahannya Peraturan Presiden No.9 Tahun 2006 dan Perpres No.71 Tahun 2005, karena dianggap tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undang jo Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dalam kajian teoretik, dapat dijelaskan bahwa makna keadilan sosial dalam konteks Indonesia, menurut Suteki disebutkan bahwa keadilan yang melandasi hukum seharusnya bukan merupakan keadilan mikro yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi (atau individual), akan tetapi keadilan makro atau keadilan sosial,⁴¹ yang memiliki cakupan lebih luas dan pelaksanaannya tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil.⁴² Apa yang baru saja di uraikan Suteki tersebut oleh Muh.

⁴¹Freud menggambarkan bahwa : "*Social justice means that we deny our selves many things so that others may have to do without them as well or, what is the same thing, may not be able to ask for them*" Lihat dalam Alain Badiou, *Philosophy and Its Conditions*, State University of New York Press, 2005, New York, hlm.122.

⁴² Lihat Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang HMN atas SDA...Op.cit*, hlm.53

Yamin disebut sebagai kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada keadilan masyarakat atau keadilan sosial.⁴³

Pendekatan ekonomi di dalam proses pembentukan hukum (atau *economic approach to law*) menurut Montesquieu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya bahaya ketidakadilan yang cenderung ditimbulkan di dalam sistem ekonomi kapitalis⁴⁴ kecenderungannya setiap orang di dalam masyarakat memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, menurut Jhering ada empat kepentingan, baik yang egoistis meliputi pahala (atau keuntungan) dan manfaat, maupun yang bersifat moralistis meliputi kewajiban dan cinta, hukum bertugas menata secara imbang dan serasi antar kepentingan-kepentingan rakyat. Kegagalan hukum dalam mengatur keseimbangan empat kepentingan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan.⁴⁵

Menurut Richard A Posner, pendekatan ekonomi tersebut diawali dengan basis premis sekolah ekonomi, yaitu bahwa setiap manusia selalu ingin memuaskan atau memaksimalkan kepentingan hidupnya (atau *that man is a rational maximizer of his ends in life*).⁴⁶ Oleh karena itu, keberadaan hukum di dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan perilaku masyarakat ketika mereka saling berkompetisi memenuhi hak kehidupannya terutama di bidang ekonomi. Sejalan dengan itu, Menurut Gustav Radbruch (1878-1949), bahwa hukum yang merupakan suatu gejala kultural dapat dipahami hanya dalam hubungan pada nilai-nilai yang diperjuangkan manusia untuk diwujudkan melalui hukum,⁴⁷ adapun nilai-nilai yang dimaksud oleh Radbruch adalah nilai keadilan, kemanfaatan dan nilai kepastian hukum.⁴⁸ Sebagai jalan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, seperti disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 30 tahun 2007 tentang Energi, yaitu bahwa “harga energi ditetapkan berdasarkan *nilai keekonomian*

⁴³Lihat Saafroedin Bahar, *Op.cit*, hlm.28

⁴⁴ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, California-USA, 1977 terjemahan M. Khoirul Anam, *The Spirit of Laws; Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm.127.

⁴⁵ Theo Huijbers, *Op.cit*, hlm.100.

⁴⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth.ed. Aspen Publishers, New York, 1998, hlm.25-26.

⁴⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat...Loc.cit.*, hlm.32

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...Loc.cit.*, hlm.18

berkeadilan.” Tentunya keadilan yang dimaksudkan adalah nilai keadilan sosial Pancasila sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam tinjauan filosofis nilai efisiensi berkeadilan dapat ditelusuri melalui penafsiran kata dikuasai selain terjadi dalam pengelolaan Sumber Daya Air seperti diungkap di dalam penelitian yang dilakukan oleh Suteki, juga terjadi di bidang energi BBM meskipun kata tersebut diganti dengan kata “mendapat izin” seperti terbukti dalam rumusan Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 5 angka 2, meliputi : pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga di serahkan kepada badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah, artinya dengan izin tersebut kemungkinan besar cenderung memudahkan badan usaha asing menguasai dan mengelola industri hilir energi BBM sesuai ketentuan pasar bebas serta menargetkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau berorientasi laba dibanding orientasi keadilan sosial.⁴⁹

Ditinjau pada segi sosiologis, implementasi HEN terbentur oleh idealisme politis yang cenderung mengabaikan putusan MK RI No.002/PUU-I/2003 tentang pembatalan Pasal 28 (2) UU Migas, artinya praktik liberalisasi yang selama ini dijalankan terbukti belum dapat melindungi hak rakyat atas energi BBM. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan negara tersebut maka pengaturan harga keekonomian energi BBM direkonstruksi atau *dingsutkan* kembali kepada prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan efisiensi berkeadilan.

Berdasarkan tinjauan yuridis normatif, filosofis dan sosiologis tersebut di atas, maka penulis mengetengahkan model politik hukum *prismatik progresif multidimensional*, yang seyogyanya tetap didasarkan kepada politik hukum ideal di bawah ini:

Tabel :Politik Hukum Hak Menguasai Negara dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Sumber Energi BBM Sesuai Pasal 33 UUD Negara RI 1945

No	Politik Hukum Hak Menguasai Negara Sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945
1	Dasar : pelimpahan kewenangan bangsa berdasarkan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945

⁴⁹ Bandingkan dengan Elli Rusliana, *Dasar Perekonomian Indonesia, Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm.82.

2	Subyek : Negara RI (Pemerintah dan Rakyat) tidak berhubungan secara subordinasi
3	Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4	Substansi : a. Kepentingan Kolektif diletakkan diatas kepentingan individu b. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. c. Perekonomian (demokrasi ekonomi) disusun atas usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. d. Di dalam asas kekeluargaan ada pengakuan negara terhadap hak individu untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam secara terbatas. e. Negara harus senantiasa menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, agar tampuk produksi tersebut tidak jatuh ke tangan orang seseorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. f. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang perseorangan <ul style="list-style-type: none"> • Negara berwenang untuk :Merumuskan kebijakan (<i>beleid</i>),Melakukan pengurusan (<i>bestuur</i>),Pengaturan (<i>regelendaad</i>), Pengelolaan (<i>beheer</i>), dan Pengawasan (<i>toezichthoudendaad</i>).
5	Idealnya Negara tetap sebagai regulator dan sekaligus operator

Berdasarkan uraian kajian teoretik serta analisis terhadap hasil penelitian dalam rangka pembahasan permasalahan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketengahkan simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi fungsi hukum energi nasional dalam melindungi hak rakyat atas energi BBM bersubsidi sekarang ini ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis adalah sebagai berikut:

a. Filosofis :

Politik hukum energi nasional di sektor bahan bakar minyak cenderung mengacu kepada faham liberalsime ketimbang berpedoman kepada nilai keadilan sosial Pancasila seperti dirumuskan oleh Pasal 7 Ayat (1) UU Energi.

b. Yuridis normatif:

a. Konsistensi politik hukum energi nasional di sektor bahan bakar minyak saat ini cenderung keluar dari koridor prinsip demokrasi ekonomi Indonesia seperti diamanatkan oleh falsafah Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

- b. Digunakannya kembali Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang *inkonstitusional* sebagai landasan regulasi energi BBM merupakan bukti pengingkaran hak rakyat atas energi yang seharusnya terus dilindungi demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu direkonstruksi kembali sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU Energi.
- c. Sosiologis,
- Argumentasi yang mendukung terjadinya liberalisasi hukum energi nasional dapat diperhatikan dari isi nota kesepahaman atau LoI (*letter of Intent*) 20 Januari 2000, berikut ini:

Di sektor minyak dan gas, pemerintah sepakat untuk mengambil langkah-langkah berikut: mengganti undang-undang yang ada dengan perundang-undangan baru yang moderen; melakukan restrukturisasi dan pembentukan kembali (*reforming*) Pertamina; menjamin agar ketentuan fiskal dan kebijakan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara global; **membuat agar harga jual produk domestik selalu berpatokan pada tingkat pasar dunia**; dan menetapkan kebijakan yang mendukung penggunaan energi domestik yang efisien dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, realisasi atau aktualisasi nota kesepahaman tersebut di tataran implementasi diwujudkan dalam bentuk UU No.22 tahun 2001 tentang Migas terebut di atas. sedangkan pada tataran praksis, praktik liberalisasi harga keekonomian energi BBM dilegitimasi melalui PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas juncto Pasal 72 PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2004, yaitu bahwa pengaturan penetapan harga energi BBM ditentukan oleh pemerintah berdasarkan perkembangan fluktuasi harga minyak bumi di pasar Internasional atau pasar bebas yaitu Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) seperti tersebut di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Perpres No.55 tahun 2005 Juncto Perpres No. 9 tahun 2006 juncto Pasal 1 angka 5 Perpres No. 71 tahun 2005.

Bila hal ini dibiarkan terus berjalan dikhawatirkan dapat mengancam hak rakyat atas energi BBM dan menimbulkan ketidakadilan.

2. Implementasi pengaturan harga keekonomian yang berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan cenderung belum dapat melindungi hak rakyat atas energi, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor kendala yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum energi tersebut, antara lain:
 - a. Kendala filosofis: belum adanya penjelasan umum Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 khususnya prinsip efisiensi berkeadilan cenderung multi tafsir, sehingga nilai keadilan sosial Pancasila cenderung belum sepenuhnya ditanamkan sebagai landasan politik hukum energi nasional. Akibatnya batasan tentang makna keekonomian berkeadilan yang merupakan penjabaran dari prinsip asas efisiensi berkeadilan tersebut cenderung liberalis seperti sekarang ini.
 - b. Kendala yuridis: belum ada undang-undang energi yang komprehensif mampu menjadi payung hukum dalam pengelolaan energi secara umum termasuk di sektor bahan bakar minyak. Akibatnya sampai sekarang regulasi harga keekonomian bahan bakar minyak belum dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyat.
 - c. Kendala Sosiologis: Prilaku Pemerintah yang mengabaikan Putusan MK No.002/PUU-I/2003 sebagai bukti bahwa praktik liberalisasi harga keekonomian energi (BBM) masih terjadi dan cenderung tidak sesuai dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seperti terlihat di dalam sasaran RPJMN 2009-2015 angka 5.
3. Di masa depan dibutuhkan konstruksi baru hukum energi nasional yang komprehensif dan terintegral yang senantiasa mencerminkan karakter keadilan sosial Pancasila seperti digariskan Pasal 33 Ayat (1); (2) dan (3) UUD Negara 1945, yang semestinya menjadi pilar politik hukum energi nasional adalah bahwa hukum mengabdikan kepada kepentingan

bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kemakmuran rakyat, yang disebut “ *prismatik progresif multidimensional*”

Implementasi studi yang didapatkan dari kajian ini secara paradigma dapat disampaikan bahwa secara umum pengelolaan kegiatan usaha hilir energi minyak (BBM) yang semula sejak berdirinya Negara Indonesia yang semula dilandasi semangat nasionalisme berdasarkan nilai keadilan sosial Pancasila adalah sebagai *modus vivendi* (kesepakatan luhur yang final)⁵⁰ semestinya nilai keadilan sosial tersebut senantiasa menjiwai setiap produk hukum yang dibuat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang luwes dan dinamis semestinya selalu menjadi batu ukur praktis ketatanegaraan dan ketatapemerintahan RI, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai moral dan religius yang merupakan pedoman bagi seluruh bidang kenegaraan.⁵¹

Paradigma pengelolaan energi nasional yang semula berlandaskan nilai keadilan sosial saat ini ketika dihadapkan kepada kekuatan ekonomi global bergeser atau *mengingsut* ke paradigma keadilan individual yang cenderung kapitalis dan neo-liberalis, di mana negara Indonesia yang kaya akan bahan mentah akan terus bergantung kepada produksi negara industri maju termasuk produksi energi minyak bumi (BBM), hal ini bertolak belakang dengan sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama dan atas dasar kekeluargaan, efisiensi berkeadilan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (sosial) dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, fungsi regulasi energi nasional harus dikembalikan kepada Konstitusi UUD Negara RI 1945 demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

⁵⁰ Suteki, *Amicus Curiae, Sinergi Pers dalam Sistem Autopoietik Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam seminar dengan Tema : *No Trial By The Press*, oleh Ikatan Advokat Perempuan Semarang (IKAPS) di Semarang 15 Desember 2011, hlm.6.

⁵¹ Soerjanto Poespowardojo, *Falsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.31

Implementasi studi yang didapatkan dari kajian ini secara teoritis Fred W. Riggs, membagi menjadi tiga karakteristik model hukum di suatu Negara, karakter memusat, memancar dan campuran atau terintegratif atau disebut prismatic, konflik-konflik kepentingan yang oleh Teori Konflik Ralf Dahrendorf, selalu terjadi dalam interaksi masyarakat harus dapat diorganisir sebagai bentuk tatanan sosial, pengaruh-pengaruh kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari kelompok-kelompok dan individu di dalam masyarakat hendaknya diolah dalam Teori Black Box Estonian sebagai *input* faktor partisipasi yang melahirkan *output* hukum dengan karakter responsif yang senantiasa ditujukan untuk kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan rakyat, seperti gagasan Satjipto Rahardjo dengan Teori Hukum Progresif.

Dalam Perspektif negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, para pendiri negara mengambil konsep prismatic atau integratif di antara dua konsepsi model hukum memusat dan memancar, tahap selanjutnya prinsip kepastian hukum dalam *rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the Rule of law*. Pilihan prismatic seperti ini menjadi keharusan atau niscaya karena dewasa ini sudah sangat sulit menarik perbedaan yang substantif antara *rechtsstaat* dengan *the Rule of law*, satu sisi adanya keharusan menegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum secara normatif berdasarkan hukum yang tertulis, namun disisi lain penegakan kepastian hukum tersebut dituntut harus bisa memastikan bahwa keadilan dapat tercipta di dalam masyarakat.⁵²

Implementasi studi yang didapatkan dari kajian ini secara pada tataran praktis dapat diketahui bahwa pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi di bidang energi khususnya sektor minyak bumi masih belum dapat menjaga hak rakyat atas energi, Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 002 / PUU-1 / 2003 diputuskan pada tanggal 21 Desember 2004 membuktikan adanya sinyalmen bahwa regulasi energi nasional

⁵² *Ibid.*, hlm.27

yang ada telah menyimpang dan bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Pengaturan harga keekonomian yang sejatinya menjadi kedaulatan negara, kini telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan Pasar Bebas atau neo-liberalisme. Ketimpangan antara negara konsumen dengan negara produsen memperlebar jarak kemampuan negara untuk menjaga hak rakyat atas energi BBM.

Pembatalan rumusan Pasal 28 (2) UU No.22 tahun 2001 tentang Migas bukan berarti telah selesai tugas negara untuk merumuskan kembali produk hukum yang mampu menjaga hak rakyat atas energi, terlebih saat ini Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan di sektor energi dalam posisi yang sangat dilematis dan cenderung lemah, satu sisi harus mempertahankan kemampuan fiskalnya dan di sisi lain harus memenuhi kebutuhan hak rakyat atas energi secara mandiri (kemandirian energi), Impor BBM selama ini setidaknya menjadi salah satu bukti dari sekian banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa negara kini tidak memiliki kekuatan atau kemauan untuk menjaga ketahanan energi BBM di dalam negeri, justru cenderung melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga hak rakyat atas energi.

Pengaturan harga keekonomian yang diserahkan kepada pasar bebas (*MOPS*) belum membuktikan adanya kemauan Pemerintah untuk membangun hukum nasional berlandaskan budaya masyarakat yang telah dikristalkan ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu semestinya agar negara selalu memiliki peranan kuat dalam perekonomian rakyatnya, maka negara harus meletakkan kembali dirinya sebagai Regulator sekaligus Operator, agar pengelolaan cabang-cabang produksi yang menunjang perekonomian bangsa tidak dikuasai oleh badan usaha dan swasta seperti sekarang ini.

Bertolak dari hasil penelitian mengenai relevansi antara fungsi regulasi energi nasional dalam menjaga hak rakyat atas energi nasional di masa depan tersebut dapat

diketengahkan beberapa poin rekomendasikan kepada Pemerintah selaku pemegang kuasa pengelolaan kekayaan alam Indonesia seperti berikut :

1. Landasan politik hukum nasional di bidang perekonomian yang digariskan di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 menggariskan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang cenderung Neo-Sosialisme Indonesia dengan berlandaskan *Good Corporate Governance* bercirikan akuntabilitas publik, demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu disarankan agar seluruh pengaturan tata kelola energy termasuk BBM merujuk kepada UU No. 30/2007 tentang Energi sebagai penjabaran prinsip efisiensi berkeadilan. Dan, menghapuskan UU No.21/2001 tentang Migas yang selama ini cenderung liberalis dan mengingkari nilai keadilan sosial.
2. Namun perlu diingat rumusan Pasal 7 Ayat (1) UU No.30/2007 tentang Energi tentang kalimat “prinsip keekonomian berkeadilan” cenderung multi tafsir, oleh karena itu perlu dipertegas batasan makna keekonomian berkeadilan yang mencerminkan nilai keadilan sosial Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu, kelompok atau golongan. Dengan demikian, rumusan Pasal tersebut perlu diformulasikan kembali agar tidak terjadi lagi praktik liberalisasi harga energi khususnya BBM, seperti selama ini dijalankan.
3. Mengubah Bab V tentang Pengelolaan Energi, Pasal 23 ayat (2) dan Ayat (3) UU Energi yang cenderung membuka peluang terjadinya praktik liberalisasi harga energi termasuk BBM bila Pengusahaan energi dan jasa energi dilakukan oleh usaha tetap dan perseorangan.
4. Meningkatkan sosialisasi budaya hemat energi menjadi salah satu pilar pencegahan ketergantungan impor energi dan pemborosan subsidi belanja BBM.
5. Perlu segera dibentuk KOMISI NASIONAL ENERGI DAN MIGAS (KNEM), komisi ini

berfungsi antara lain (1) mengawasi proses tender pengadaan energi dan Migas mulai dari hulu dan hilir, (2) mengawasi pendanaan pengadaan energi dan Migas, (3) melanjutkan tugas Tim Pemberantasan Mafia Migas yang sekarang ini sudah ada untuk memberantas praktik mafia migas yang selama ini cenderung merugikan rakyat dan negara, (4) mendampingi Dewan Energi Nasional dalam merumuskan strategi pencapaian target pencapaian kebijakan energi yang komprehensif melindungi, mengayomi dan melayani hak rakyat atas energi termasuk BBM dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dalam menunjang kegiatan hidup sehari-hari, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, (5) mengawasi pengaturan pengalihan subsidi belanja BBM kepada sektor-sektor produktif lain agar tidak salah sasaran serta tidak sesuai dengan hakikat hak setiap rakyat Indonesia untuk mendapatkan subsidi dan (6) menjamin bahwa hak rakyat atas energi termasuk BBM tidak menjadi alat ekonomi dan politik bagi pemerintah untuk merepresi hak setiap orang.

6. Meletakkan kembali kewenangan negara melalui pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*beleid*) dan melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap pengelolaan energi BBM,
7. Meninjau kembali pengaturan patokan penghitungan harga BBM berdasarkan MOPS yang cenderung fluktuatif dan ditentukan oleh *trader*, mengurangi variabel penghitungan harga keekonomian energi BBM dan memperjelas rincian variabel alpha sebagai upaya mewujudkan GCG yang transparan, mengupayakan kebijakan pemberian fasilitas pajak impor BBM 0% untuk meminimalisir harga energi,
8. Meninjau kembali kebijakan pembelian BBM melalui MOPS atau *trader* di Singapura, serta mempertimbangkan kembali untuk melakukan pembelian melalui kontrak berjangka langsung kepada negara produsen atau tanpa melalui perantara.
9. Mengingat Indonesia belum memiliki infrastruktur kilang yang memadai untuk mengolah minyak di dalam negeri. Sebaiknya ditinjau kembali usaha eksplorasi dan eksplorasi yang cenderung beresiko terhadap keuangan negara, serta mengalihkan biaya eksplorasi untuk

membangun dan membenahi infrastruktur kilang-kilang tua yang sekarang ini cenderung tidak lagi layak dalam menjaga ketersediaan energi BBM di dalam negeri, dan mengoptimalkan jumlah produksi minyak dalam negeri.

SUMMARY

In essence, the one aim of goals of state to protect the entire Indonesian nation and the entire country of Indonesia. Therefore, the necessary democratic system of Indonesia's economy is always based on Pancasila and the values of social justice based on the Article 33 Paragraph (1), (2), (3), and (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as its terms of reference, namely that:

(1) The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship; (2) Production branches which are important for the country and dominate the life of the people controlled by the state; (3) Land and water and riches contained therein shall be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people, and (4) The national economy shall be organized based on the principle of economic democracy with the principles of togetherness, efficiency with justice, sustainability, environmental friendliness, independence and balancing progress and national economic unity.

Ideally implementation of energy fuel economic price adjustment should be based on principle of equitable efficiency, such as mentioned Article 7 Paragraph (1) of Law No. 30 of 2007, namely that "energy prices are set based on a fair economic value."

Unfortunately, the practice of liberalization of economic price of fuel energy still running by rules of the free market mechanism, in accordance with Article 28 Paragraph (2) of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, the impact are feared could threaten the loss of people's right to energy fuel and cause injustice.

Departing from the practice of legal conflicts in the liberalization of the economic price of fuel energy, Constitutional Court annul Article 28 Paragraph (2) Oil and Gas Law by decision No. 002 / PUU-I / 2003 because it was considered unconstitutional.

However, at the practical level the practice is still carried out, namely through Article 72 Paragraph (1) PP 36 2004 About the Downstream Oil and Gas in conjunction with Article 72 of Regulation 30 of 2009 on the Amendment Regulation 36 of 2004 in conjunction with Article 1 paragraph 4 and 5 Presidential Decree 55 of 2005 Jo Presidential Decree No. 9 2006 in conjunction with Article 1 point 5 of Presidential Decree No. 71 in 2005.

Legal facts prove that during this time there has been a liberalization law on Article 28 Paragraph (2) Oil and Gas Law is deemed unconstitutional, but the fact still enforced by the government and used as a reference in setting the economic price of fuel energy.

There are allegations that the government's move is an action that tends to ignore the law. The government's move is likely to have an impact threatens people's right to energy, including fuel and could lead to injustice.

Social facts show that implementation tends HEN function doesn't yet to protect the people's right to energy could be noticed from the dynamics of rising fuel prices from 2003 to 2013 as presented in Table 3, where since the enactment of Article 28 Paragraph (2) and Paragraph (3) Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, fuel prices tend to follow the rules liberalized oil prices in international oil exchange market Singapore (MOPS).

Physical facts indicate that the implementation HEN function doesn't yet protect the people's right to energy, could be observed through the low level of industrial production in the domestic upstream oil and the amount of the total value of fuel imports

starting in 2003 until 2013, the following: 2003 fuel imports reached 137 126. 653 kiloliters (KL), 2004, oil imports reached 148 489 589 KL is greater than domestic oil production 400 486 thousand barrels.

Based on the description of the background of the above, it could be said that the debate on the economic price adjustment of fuel energy is very important and latent for further investigation, as restrictions on the problem in this study presented three fundamental issues at the core of the study, namely:

- a. How the function of the operation of the national energy law in protecting people's right to subsidized fuel energy today?
- b. Why the implementation of a national energy law on setting up the economic price of subsidized fuel energy tends not had been able to protect the people's right to ene
- c. How the new construction of national energy law on setting the economic price of subsidized fuel in protecting people's right to energy in the future?

The main study dissertation entitled "Reconstruction of the National Energy Regulation in Protecting People's Rights-Based Energy Top Progressive Law, Study Regulations Price Economies Fuel (BBM) Subsidized" contains the variables subject matter will be studied further in this dissertation. Therefore, to reveal the subject matter needs to be explained the meaning and definition of these variables.

Reconstruction according to the definition of Black Law Dictionary is:

The name commonly given to the process of reorganizing, by acts of Congress and executive action, the Governments of the states of the which had passed ordinances of secession, and of re-establishing constitutional Reviews their relations to the national government, restoring Reviews their representation in congress, and The Necessary effecting changes in their internal government after the close of the civil war.

Reconstruction according to Indonesian Dictionary is the return to normal. The reason for doing reconstruction is the essence of which is that the law is always in the process of becoming (law as a process, law in the making) as it was intended by Satjipto Rahardjo in the idea of Progressive Law.

Further, the definition of regulation in view Philippe Nonet and Philip Selznick, is the process of elaborating and correcting the policies needed to realize the goals of the law. Regulation is thus understood as a mechanism to clarify the public interest. Regulation includes activities to test a number of alternative strategies to implement the mandate and reconstruct the mandates with the help of lessons learned, with the help of Legal Theory Progressive which has a legal presumption to humans.

Rights mean freedom, sovereignty, privilege, power, feasibility, authority, authority, prerogative or property belonging to the people on the sources of production one fuel energy sources become important capital for the achievement of the overall prosperity of the people.

In line with the philosophical meaning of the word economics above, the definition of a fair economic price according to Bambang Soesatyo, is the essence, because it contains the value of justice or fairness for producers, state, and consumers, the economic price also reflects the protection or the protection of consumers by adopting state free market mechanism. In a free market mechanism which is based transparency, economic price should be more easily realized.

Meaning a fair economic price in perspective normative mentioned in Article 1 Paragraph (31) of Government Regulation of the National Energy Policy 2014 which was passed on January 28, 2014, namely that:

(Price) Economies of justice is a value / cost that reflects the energy production costs including environmental costs and the cost of energy conservation and sustainability of the investments studied based on the ability of communities.

Based on the definition of the variables describing the subject matter of the above, it could be concluded that Reconstruction of the National Energy Regulation in Protecting People's Rights-Based Energy Top Progressive Law, Study Regulations Price Economies Fuel (BBM) is a form of political shifts Subsidized national energy laws and processes application of the law is done gradually by promoting the precautionary principle and the principle of efficiency of justice in a democratic system adopted Indonesian economy, so expect a legal product that is produced could be used optimally in protecting people's right to energy, especially fuel.

Legal product that is intended is a legal product that reflects the multidimensional character of prismatic progressive, meaning that the national energy law that formed in the middle of the pressures of globalization and liberalization of the economy remain strong in implementing the principle of efficiency of justice which is the foundation of democratic politics Indonesian economy, namely Article 33 Paragraph (2) , (3) and (4) the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 or to reflect the values of social justice with due regard to the rights of individuals or prismatic.

In addition, these regulations are able to act progressively as a catalyst and mediator bridging the various participation and economic interests and politics all the variables that affect the working of the law, the aim is that the future implementation of the legal product does not cause noise or conflicts of law in amid the various dimensions of public life or multidimensional, despite the pressures of globalization and economic

liberalization has become a necessity that must be recognized and accepted Indonesia as a member of WTO.

Model energy law prismatic progressive multidimensional character is expected to be a tool that is gradually able to shift public behavior that characterized the traditional individualistic direction prismatic society could give its members a sense of excitement, challenge, progress and so on as well as the guarantee of happiness or salvation members of the public will not be obtained in the system radiate and converge or *rechtsstaat* system and the rule of law.

The theory will be used as a tool analysis is the Legal System Theory (The Legal System) Lawrence M. Friedman, Progressive Legal Theory Satjipto Rahardjo, Blumer Symbolic Interaksionalis Theory, Theory of *Economic Analysis of Law* Richard A. Posner, The working theory of Law (Law, Order and Power) William J. Chambliss and Robert B.Siedman, Legislative Theory, Process of Law, Theory of Justice John Rawls, Theory of Responsive Law (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law) Philippe Nonet and Philip Selznick, Black Box Theory of Public Policy David Easton, Legal Theory Prismatic Fred W. Riggs, Ralf Dahrendorf Conflict Theory and Theory of Public Policy Wayne Parsons.

The idea of progressive law emerged as a correction to the reality of modern empirical or legal circumstances at the time of the old order is laden with bureaucracy and procedures, leaving it vulnerable to distorted, modern law shifted into a political tool to maintain power at the time, law-century modern nineteen in the perspective of Western Europe designed to protect and ensure the independence and freedom of the individual or liberal and individualistic in accordance phrase "*laissez faire laissez passer*" was initiated by

Adam Smith through his book, "The Wealth of Nations" (1776) through the invisible hand theory.

Base idea of progressive law starts from the basic assumption that the law just for humans, as well as the ideals that the law has a purpose in the form of welfare and happiness of man, the law is always in the status of "law in the making" or the law in the process to continue to be and not as the absolute and final of an institution.

National energy of law as a legal system that includes substance, structure and legal culture is the result of formalization and crystallization of competition and conflict of interests of each of the variables that effect of the law making process, start from law making institutions, implementation and enforcement on the ground or in the empirical nature, and then law is a political products

Simmel says that something real is empirical or parts of the world a very broad social or cultural fragments objective, it's mean that every law has its own distinct social structure. Conflicts that characterize the operation of the national energy of law in the field of protecting people's rights over particular energy-related economic price adjustment subsidized fuel energy as a form of social phenomenon in the form of patterned behaviors that are symbolic, the behavior of the full specific meanings.

Theory of Symbolic Blumer very relevant Interaksionalis paired together Working Theory of Law and Robert William J. Chambliss B. Siedman, Legal System Theory and Theory of Conflict Ralf Dahrendorf. Given this dissertation study examines the legal relevance in the perspective of the economic price adjustment of fuel, and then the Theory of Economics of the Law Ricard A. Posner could be juxtaposed with Cybernetics Theory Talcott Parsons and Black Box Theory of Public Policy David Easton.

In the perspective of Indonesia, the main political basis of national law is a destination country which is a guideline for the variables or state institutions in making laws or legal policy in producing a national energy law system (HEN). destination country as well as well as a measurement tool for the implementation of national energy law function so as not to come out or distorted (deviation) of the framework objectives set in the destination country, or the direction in which the law will be established and enforced.

Associated with the creation of a nation allow or legal policy which is currently affected by the pressures of economic globalization that tends to bring various world economic system that is liberal, individualist, capitalist or socialist and communist economic systems, Theory of Prismatic Fred W. Riggs against Public Policy Theory Wayne Parsons very relevant to find a new model national energy law in the future in accordance with the values of social justice Pancasila.

The position of the stand point of the legal research, act as a participant, observer, or a combination of both will determine the method used to think. This study included in the tradition of qualitative research operationalization of research is based on naturalistic view point(naturalistic paradigm) on cetaunchly with interpretive understanding of the human experience.

Francis Bacon said that the real knowledge is the knowledge received through sensory contiguity with the world of facts, therefore, the experience is the source of true knowledge. In line with Bacon, John Locke said that all knowledge is derived from experience, reason like a white paper and will be painted by the earlier experience thus was born the idea. In the view of Thomas Hobbes stated that sensory experience as the beginning of all recognition.

Furthermore, to solve the above subject matter is used as a paradigm of basic or metaphysical belief system that is based on assumptions ontological, epistemological, and methodological. The basic idea critical Legal Theory paradigm is thought that the law could not be separated from politics and economics, law is not neutral and value-free as espoused by the school of positivism or dogmatic, it means that the law-making process include the manufacture, application until enforcement is always tinged with pro-pro or interests. Even in the liberal legal order established confidence in the impartiality, objectivity and predictability in the law.

Critical Legal Theory was born pioneered by Max Horkheimer, Theodore Adorno, and Herbert Marcuse. Max Horkheimer was born February 14, 1895 in Zuffenhausen near Stuttgart, critical theory (critical theory) its existence appeared in 1923, Horkheimer dissertation entitled Kant's Critique of Judgment thought to be a reference in the Frankfurt School. The common thread Critical Studies (Critical Theory) actually has been developed by Karl Marx (1818-1883) and Sigmund Freud (1856-1939), Kant, Hegel and Weber.

The research approach used in this study is the approach of socio-legal research is a study of the law by using the approach of science of law and social sciences. This approach is especially important in developing countries like Indonesia, the goal is to know the contents of legislation and case law or operation of law in society (in this study the operation or effectiveness of HEN in setting the economic price of fuel energy. Pen).

The research approach used in this study is a socio-legal approach to research is the study of the law by using the approach of science of law and social sciences. This approach is especially important in developing countries like Indonesia, the goal is to know

the contents of legislation and case law or operation of law in society (in this study the operation or effectiveness of HEN in setting the economic price of fuel energy. Pen).

Socio legal studies in an interdisciplinary approach is needed, is concept and theories from various disciplines are combined and merged to discuss the phenomena of law, which is not isolated from the perspectives of social, political, economic, cultural, legal where it is located.

Socio legal definition studies once described by Wheeler and Thomas, which is an alternative approach to test the doctrinal studies (normative / dogmatic) against the law. Socio word in sociolegal studies explaining the relationship between the perspective in which the law was (an interface with a perspective within the which law exists).

Characteristics of socio legal studies could be identified through the following two points: (1) study sociolegal textual study, clauses in legislation and policy could be analyzed critically and explained the meaning and implications of the legal subjects (including marginalized groups), and (2) study sociolegal develop various new methods the marriage between law and social science methods, such as qualitative research and ethnography sociolegal.

Characteristics of socio legal studies could be identified through the following two points: (1) study sociolegal textual study, clauses in legislation and policy could be analyzed critically and explained the meaning and implications of the legal subjects (including marginalized groups), and (2) study sociolegal develop various new methods the marriage between law and social science methods, such as qualitative research and ethnography sociolegal.

Normative juridical approach, philosophical and sociological used to see the extent of the consistency of implementation and operation of HEN when faced with the pressures of economic globalization and politics in the era of free trade that tends liberal capitalistic. Stufenbau becomes very important theory presented in this study to find evidence of the presence or absence HEN unconstitutional in the implementation of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 type or types according to this study is a socio-legal research, because the object being studied is the law that is constructed as a result of society's behavior.

Based on the problems, research objectives and paradigm used, the specification of this study is qualitative inductive, ie a thorough research to describe the object of study that HEN functions in protecting people's right to subsidized fuel energy. Furthermore, theory building to investigate and solve problems that are drafted at the level of micro analysis as symbolic reality and tend pro populus. By using primary data as the main data and is supported by secondary data.

In line with the democratic principles of the Indonesian economy and Article 7 Paragraph (1) of the Energy and PP 79 Year 2014 on the Progressive Law perspective, the national energy law (HEN) as a legal system is ideally used to realize human happiness.

Satjipto Rahardjo as the originator of the Progressive Law stressed that "the law is an institution that aims to deliver man to life fair, prosperous and make people happy", therefore the law of man is as a basic assumption of progressive laws that should be implanted and seeded into operation energy law until at practical level, including in the economic price adjustment of fuel that had not had a legal basis in the level of implementation.

Based on the principles of fairness and efficiency of the Progressive Law idea liberalization should practice the economic price that has been legitimized government through the implementation of Article 28 Paragraph (2) Oil and Gas Law and Regulation 36 of 2004 in conjunction with Regulation 30 of 2009 gradually began to be shifted or reconstructed the economic price adjustment of fuel energy based on the principles of social justice efficiency. This is consistent guidelines state the purpose of which is to protect the entire Indonesian nation and the entire country of Indonesia and promote general welfare.

On the economic perspective and the law of demand and supply (demand and supply), HEN faced with pressures of economic globalization that could not be avoided, lower domestic oil production and an increase in energy consumption in fuel Indonesia to countries in world oil producers to encourage the government increased the cost of imported fuel subsidies of the free market Asia in Singapore (Mid Oil Platt's Singapore).

Based on the recommendations of the World Bank (BD) and IMF assistance upon delivery of funds amounting to 43 billion dollars to recover the financial crisis of 1997/1998.in clause Letter of Intent (LoI) January 20, 2000 in mentioned that the Indonesian government in the law-making process or the law making process of national energy particularly in the oil and gas sector shall soon be standardized in accordance free market system, namely:

In the oil and gas sector, the government agreed to take the following steps: replacing the existing laws with new legislation which is modern; restructuring and reshaping (reforming) Pertamina; ensure that fiscal and policy conditions for exploration and production activities remain globally competitive; make the selling price of the domestic product is always based on the level of the world market; and establish policies that support the use of domestic energy-efficient and environmentally sound.

And then, based on the recommendations of the IMF born BD and Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, which tends to refer to liberal capitalistic free market system, as

mentioned in Article 28 paragraph (2) that the price of fuel oil and natural gas delivered to the mechanism healthy competition and fair. Although in the journey of Article 28 paragraph (2) is couldceled by the Constitutional Court through Decision No.002 / PUU-I / 2003 dated December 15, 2004, because it was considered unconstitutional or contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945.

And then to run the Oil and Gas Law of 2001 established a Government Regulation 36 of 2004 on Oil and Gas Downstream Business Activities, in Article 2 in conjunction with Article 44 c of Government Regulation 36 of 2004 with amendments PP 30 of 2009 on the Downstream Oil and Gas, stated that

Downstream Business activities carried out by business entities that have a business license issued by the Minister and held through a competition mechanism reasonable, fair and transparent.

Based on the contents of the Articles of the above indicates that the manufacturing process of the law (law making process) in setting national energy economic prices ranging from the level of law making institutions, implementation (implementing institutions) and reached the level of society (role occupant) tend to adhere to the rules of the free market liberal capitalistic character.

The liberal tendency mentioned in Article 1 paragraph 4 and 5 of Presidential Decree 55 of 2005 and the amendments there to Presidential Decree 9 of 2006JoArticle1 point 5 of Presidential Decree71of 2005, namely that energy prices fuel sticking to the transaction price buying and selling oil in Singapore Mid oil Platt's Singapore(MOPS) with the benchmark price set by the Government(ESDM minister with the minister consideration). Although in Article72 of Government Regulation 30 Year 2009 on the Amendment of Government RegulationNo.36 of 2004has been mentioned that setting fuel prices set by the

government. Practice liberalization of energy prices fuel through the normative juridical rules tend to be very harmful to people's right to energy fuel and spark in justice.

According to the author of the could cellation of Article 28 paragraph (2) of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas by the Constitutional Court should also could cel rules under both in terms of implementation of PP 36 of 2004 with amendments PP 30 Year 2009 and at practical level Presidential Decree 55 of 2005 and the amendments thereto Presidential Decree 9 of 2006 and Presidential Decree 71 of 2005, because it was considered incompatible with Article 3, paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 states that NRI Constitution of 1945 is the legal basis for legislation in conjunction with Article 2 states that Pancasila is the source of all sources of state law.

The liberalization tendencies mentioned in Article 1 paragraph 4 and 5 Presidential Decree 55 of 2005 and the amendments there to Presidential Decree 9 of 2006 Jo Article1 point 5 of Presidential Decree71of 2005, namely that energy prices fuel sticking to the transaction price buying and selling oil in Singapore Mid oil Platt's Singapore (MOPS) with the benchmark price set by the Government (ESDM minister with the minister consideration). Although in Article 72 Government Regulation 30 Year 2009 on the Amendment of Government Regulation No. 36 of 2004 has been mentioned that setting fuel prices set by the government. Practice liberalization of energy prices fuel through the normative juridical rules tend to be very harmful to people's right to energy fuel and spark injustice.

In a theoretical study, explained that the meaning of social justice in the perspective of Indonesia, according to Suteki mentioned that the justice which underlie the law should not constitute a micro justice is a justice whose implementation depends on the will of personal (or individual), but the macro fairness or social justice, which has a broader

scope and its implementation depends on the creation of social structures are fair. What just in the Suteki described by Muh. Yamin referred to as the welfare of the people is the basis and purpose of the independent Indonesian state is in the public justice or social justice.

Economic approach in the law-making process (or economic approach to law) according to Montesquieu is necessary to prevent the danger of injustice that tend to be generated in the capitalist economic system the tendency of everyone in society have an interest to meet the needs of each, according to existing Jhering four interest, both egoistic include reward (or benefit) and benefits, and that is moralistic includes obligations and love, the legal duty to organize in a draw and matching between the interests of the people. The failure of the law in regulating the balance of the four interest could give rise to injustice.

According to Richard A Posner, the economic approach begins with the premise basis of economic schools, namely that each human being always wants to satisfy his or maximize interest (or that man is a rational maximize of his ends in life). Therefore, the existence of the law in public life doesn't be separated from people's behavior when they compete fulfill the rights of life, especially in the economic field.

According to Cooter and Ullen, economic analysis of the law appears as a device to predict the events surrounding the tug economic interests of each individual, to protect the rights of each person of the possession and abuse of dominant groups and prevent conflicts of interest. Human nature as economic beings (*homo economicus*) rational (or a rational maximize) is always eager to satisfy his personal interests (his satisfactions-what we shall call his "self-interest"), classical economic theory considers that human desire is driven by the scarcity of resources, as a result there are growing concerns for some groups of people would lose their basic needs, the man finally made options as alternatives to satisfy their interests. According to Gustav Radbruch (1878-1949), that the law is a cultural phenomenon

could be understood only in relation to the values championed human to be realized through the law, while the values in question by Radbruch is the value of fairness, usefulness and value of legal certainty , As a way to achieve the greatest prosperity and happiness of the people.

Departing from the above theoretical review, it could be found that the terms of the condition of the existing normative HEN, in the perspective of Stufenbau theory, in which the position of Article 28 paragraph (1) of Act 22 of 2001 on Oil and Gas and its rules of procedure and rules of counter-productive praxis Article 7 Paragraph (1) of Act 30 of 2007 on Energy are under the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. As mentioned in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 Concerning the

Establishment of legislation that normatively types and hierarchy of Laws made up as follows:

- a. Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;
- b. People's Consultative Assembly Decree;
- c. Law / Government Regulation in Lieu of Law;
- d. Government Regulations;
- e. Presidential Decree;
- f. Provincial Regulation; and
- g. Regulation Regency / City.

Thus, when Article 28 paragraph (2) of the 2001 Oil and Gas Law unconstitutional, and then the rules below could be considered equal. Ideally regulated energy prices fuel in national legal systems, who was born in Indonesia should always imbued by the spirit of Pancasila values of social justice as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. As mentioned in Article 7 paragraph (1) of Law No. 30 of 2007 on Energy, namely that " energy prices are set based on a fair economic value. "Surely that

meant justice is social justice values of Pancasila in accordance with Article 2 of Law No. 12 of 2011.

In the perspective of the construction empirical determination of fuel or energy price regulation has not been fully based on the value of social justice or deviate the ideal conditions, but still refers to Article 28 paragraph (2) Oil and Gas Law 2001 which liberalized energy pricing fuel to submit to the free market mechanism in the stock buying and selling petroleum in Singapore (MOPS).

Differences in pricing the fuel energy tends to bring the various conflicts between the government and the people as well as the gap that may threaten people's rights over the fuel energy in the community. With such thoughts, the question to ask is whether the Act Energy Oil and Gas constitutional, if not it necessary to do political reconstruction of national energy law in protecting people's rights over the fuel energy, on the basis of whether reconstruction is done, whether liberalization energy economic price of fuel at the will of the people, whether the impact of the liberalization of the fuel energy economical price? To answer the three questions above required a thorough study on the philosophical side, normative and sociological.

In a review of philosophical perspective values fair efficiency could be traced through probe whether or not the interpretation of said controlled besides irregularities occurred in the management of water resources as revealed in a study conducted by Suteki, also occur in the energy field of the fuel even though the word is replaced with the word "permission" as evidenced by the formulation of Article 23 paragraph (1) in conjunction with Article 5 paragraph 2, include: processing, transportation, storage and trade submitted to a business entity that has a license from the government, it means the license is likely to tend to facilitate foreign enterprises to master and manage energy fuel downstream industries in

accordance with the free market and target maximum profit or profit-oriented than social justice orientation.

Seen in sociological terms, the implementation of HEN hit by political idealism that tends to ignore the decision of the Court of RI No.002 / PUU-I / 2003 on the could cellation of Article 28 (2) Oil and Gas Law, meaning liberalization practice during this run couldn't yet be proven to protect people's right to fuel energy.

Therefore, in order to achieve the objectives of the country economic price adjustment reconstructed fuel energy back to the principles of economic democracy which is based on the efficiency of justice. Based on the normative, philosophical and sociological mentioned above, the author explores the legal political model of progressive prismatic multidimensional, with consideration, namely in the prismatic models reflected responsive legal character that combines two different character models, mixed models with character liberalization, individual capitalistic and centralized model with a collective character. Prismatic models also comply with anti-constitutional character liberalization and anti-free fight liberalism and anti-socialist-communist, as seen in the legal political base below:

Tabel : Mastering State Political Rights Law in Protecting People's Rights Over Fuel Energy Source In accordance Article 33 of the 1945 Constitution

No	Political Rights Law Master of State Pursuant to Article 33 of the Constitution NRI 1945
1	Basis: delegation of authority of the nation under Article 33 paragraph (1), (2) and (3) the Constitution NRI 1945
2	Subject: State of Indonesia (Government and the People) is not related subordinated
3	Goals to be achieved is for the greatest prosperity of the people
4	Substance: a. Collective interests are put above the interests of individuals b. Earth, water and natural resources contained in it are controlled by the state. c. The economy (economic democracy) prepared on the joint venture and is based on the principle of family. d. In the principle of the family there is recognition of the right of individual countries to participate in the management of natural resources are limited.

	<p>e. State must always dominate production branches which are important for the country and dominate the life of the people, so that the production reins do not fall into the hands of someone who is in power and the people will be oppressed.</p> <p>f. Only companies that do not dominate the life of the people should be in the hands of individual</p> <ul style="list-style-type: none"> • State is authorized to: Formulate policies (beleid), Perform maintenance (bestuur), setting (regelendaad), Management (BEHEER), and Supervision (toezichthoudendaad).
5	Ideally State remains as regulators and operators at the same

Based on the results of research and studies that have been done could be concluded that HEN doesn't function optimally in protecting people's right to energy fuel pressure amid a wave of economic globalization and economic liberalization pressure, the conclusion that could be posited, namely that:

Based on the description of theoretical study and analysis of the results of research in the framework of the discussion of the problems that has been done in previous chapters, a conclusion that could be proposed in this dissertation is as follows:

1. application of current fuel energy law (existing) can be noticed through anormative stand point, philosophical
 - a. normative juridical perspective:
 - a) At the level of implementation indicates that the substance construction of national energy regulation in setting the economic price of fuel energy is still referring to Article 28 Paragraph (2) of Law No. 22 Year 2001 regarding Oil and Natural Gas that is considered unconstitutional by the Constitutional Court by the Constitutional Court Decision Number 002 / PUU-I / 2003. Since the article was couldceled MK, ideally grounding energy fuel economic price adjustment referred to Article 7 Paragraph (1) of Law No. 30 Year 2007 on energy that reflect the principles of economic democracy of

Indonesia based on the principle of efficiency of justice. But in reality until now the practice liberalization economic price of fuel energy is still ongoing, it means there is a suspicion that the positive law to regulate the price of energy economic (norms of economic cost) contrary to the principle of justice.

- b) At the practical level, the practice of liberalization of energy fuel economic price legitimized through PP 36 Year 2004 on Oil and Gas Downstream Business Activities in conjunction with Article 72 PP 30 Year 2009 on the Amendment of PP 36 Year 2004, namely that the arrangement of fuel energy pricing is determined by the government Based on the development of oil price fluctuations on the international market or the free market is the Mid Oil Platt's Singapore (MOPS) as mentioned in Article 1 paragraph 4 and 5 of Presidential Decree 55 of 2005 in conjunction with Presidential Decree No. 9 2006 in conjunction with Article 1 point 5 of Presidential Decree No. 71 in 2005. If this is allowed to continue running it feared could threaten people's rights to energy fuel and cause injustice.

- b. Viewed from the side philosophical perspective:

meaning that a fair economic price defined in Article 7 Paragraph (1) Energy Act reflects the purpose of the state to protect the entire Indonesian nation and the entire country of Indonesia through economic price adjustment based on the values of fairness, expediency and legal certainty based on Pancasila as the source of all sources of law is tested or are faced with the principles of the free market that is based on the principle of profit (profit) alone;

- c. Judging from the sociological perspective:

legal construction of national energy currently used tend to invite a legal conflict between the public against the government, because it is considered to be a political tool and contains loads of free market interests, as expressed in the contents of LoI (Letter of Intent) January 20, 2000 , the following:

In the oil and gas sector, the government agreed to take the following steps: replacing the existing laws with new legislation which is modern; restructuring and reshaping (reforming) Pertamina; ensure that fiscal and policy conditions for exploration and production activities remain globally competitive; make the selling price of the domestic product is always based on the level of the world market; and establish policies that support the use of domestic energy-efficient and environmentally sound;

2. Implementation of the economic price adjustment is based on the principle of efficiency of justice tend to not be able to protect the people's right to energy, this is caused by the presence of obstacles several factors that affect the operation of the energy law, among others:

- a. Philosophical Obstacles: lack of public explanation of Article 33 Paragraph (4) the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, especially the principle of fair efficiency tends to multiple interpretations, so that social justice values of Pancasila tend not been fully embedded as the political foundation of national energy law.
- b. Constraints Juridical: still uses Article 28 Paragraph (2) as an oil and gas law enforcement or setting reference prices of fuel energy at practical level as proof that HEN could not provide legal certainty to the people.
- c. Constraints Sociological: Government behavior that ignores the Constitutional Court Decision No.002 / PUU-I / 2003 as evidence that

the practice liberalization economic price of energy (fuel) is still going on and tend to be incompatible with the purpose of the state to protect the entire Indonesian nation and the entire country of Indonesia ,

3. In the future new construction required national energy law that is responsive, visionary, futurist, comprehensive and integral ranging from fundamental level, the level of implementation up to the level of praxis always involves community participation. So that the output products generated philosophical legal, normative juridical and sociological reflect the values of social justice, usefulness or happiness and give legal certainty to the public that HEN able to protect people's right to energy (fuel) forever in the middle of the pressures of globalization and economic liberalization must be received as a consequence of Indonesia's participation in the WTO as well as members of the global world community;

1. That legal product that reflects the multidimensional character of prismatic progressive, meaning that the national energy law that formed in the middle of the pressures of globalization and liberalization of the economy remain strong in implementing the principle of efficiency of justice which constitute the political foundation of economic democracy Indonesia namely Article 33 Paragraph (2), (3) and (4) the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 or reflect the values of social justice with due regard to the rights of individuals or prismatic;
2. In addition, these regulations are progressively able to act as catalysts and mediators who bridge the various participation and economic interests and politics all the variables that affect the working of the law, the aim is that the future implementation of the legal product does not cause noise or conflict law in the midst of various dimensions of public life or multidimensional.
3. At the end of the model law prismatic progressive energy multidimensional character is expected to be a tool that gradually able to shift public behavior that

characterized the traditional individualistic direction prismatic society could give its members a sense of excitement, challenge, progress and so on as well as collateral happiness or salvation will not be obtained by members of the public in the system radiate and converge or rechtsstaat system and the rule of law.

Paradigm of managing business activities downstream energy (fuel) which was originally since the establishment of the State of Indonesia which was originally based on the spirit of nationalism based on social justice values of Pancasila is as vivendi mode (the sublime

K A T A P E N G A N T A R

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih dan Penyayang, Disertasi yang berjudul ” Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif (Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi)” ini pada akhirnya dapat penulis selesaikan. Disertasi ini merupakan suatu tulisan untuk mengungkapkan keperihatinan dan sekaligus kegelisahan penulis terhadap fenomena pengaturan harga keekonomian energi BBM yang cenderung liberalis kapitalistik serta mengacu kepada ketentuan pasar bebas, oleh karena itu Pengaturan Harga Energi BBM yang terdapat di UU Migas No.22 Tahun 2001 perlu segera diingsutkan sesuai UU Energi No.30 Tahun 2007 sebab energi sebagai barang kebutuhan publik dan hak rakyat yang harus senantiasa dilindungi oleh negara, ternyata berdiri di dua sisi, yaitu sisi ekonomi yang cenderung berorientasi keuntungan serta efisiensi ala globalisasi ekonomi yang liberalis kapitalistik, dan sisi hukum yang selalu cenderung berorientasi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam kerangka pemikiran inilah kemudian dilakukan berbagai upaya standarisasi pengaturan energi nasional sesuai aturan main yang terdapat di dalam mekanisme pasar

bebas, liberalisasi ekonomi dan hukum energi yang dipilih oleh pemerintah ternyata belum menjadi solusi untuk melindungi hak rakyat atas energi, bahkan cenderung menimbulkan ketidakadilan serta konflik hukum antara rakyat (*role occupant*) dengan pemerintah (*law making institutions*).

Perjalanan panjang dalam penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dukungan serta peran berbagai pihak terkait. Untuk itu, dengan segala kekurangsempurnaan penulis dalam menuangkan Disertasi ini, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Diponegoro, yakni Rektor dan Para Pembantu Rektor yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral di PDIH UNDIP, dan demikian pula Ketua Program Pascasarjana yang telah membantu memberikan fasilitas demi penyelesaian studi penulis.
2. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.M.Hum selaku Promotor Disertasi ini sekaligus Ketua Program PDIH UNDIP yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis sejak kali pertama penulis masuk studi di PDIH UNDIP sampai dengan penyusunan Disertasi ini.
3. Prof. Dr. Suteki, SH, MHum, selaku Co-Promotor Disertasi yang telah dengan sabar membimbing dan memasukkan pemikiran teoretik progresif, kritis dan konstruktif kepada penulis dan menuangkan teori-teori ke dalam penulisan Disertasi serta selalu mendorong penulis untuk selalu berfikir semakin teliti, cermat dan tidak terburu-buru dalam menulis agar hasil penulisan yang dicapai sesuai aturan metode penulisan ilmu hukum yang tepat dan benar, hingga akhirnya terwujudlah penulisan Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum selaku Rektor UNDIP dan Pembimbing satu Tesis Penulis di Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah dengan tulus, penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan menasihati penulis agar selalu yakin dan mampu menyelesaikan studi hingga jenjang doktoral.
5. Prof. Dr. Benny Riyanto, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum UNDIP dan Ketua Sidang Kelayakan, Tertutup dan Terbuka disertasi ini.
6. Prof. Dr. Rahayu, SH, MH, selaku Sekretaris akademik Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan sekretaris sidang kelayakan, tertutup dan terbuka disertasi ini.
7. Prof. Yusriadi, SH, yang telah dengan ikhlas memberikan ajaran-ajarannya tentang berbagai teori-teori hukum dan membimbing penulis tentang berbagai keilmuan hukum

yang sesuai dengan tradisi asli bangsa Indonesia di tengah globalisasi industri sekarang ini.

8. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS selaku guru besar Fakultas Hukum UNDIP dan dahulu Pembimbing dua Tesis Penulis di Magister Ilmu Hukum UNDIP, yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis tentang pentingnya belajar dan terus belajar.
9. Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS, Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP yang telah mendorong penulis sejak masuk studi di PDIH UNDIP untuk berani berfikir secara progresif dalam menuliskan sebuah Disertasi.
10. Dr. Nanik Trihastuti, SH, MH, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk tidak ragu dalam menemukan relevansi keterkaitan antara hukum dan ekonomi yang melingkupi pengaturan harga keekonomian energi, dengan penuh dedikasi Beliau memberikan masukan dan wacana bahwa dalam mengkaji mengenai pengaturan harga energi harus selalu diperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu ekonomi dari pemikiran para pakar ekonomi, meskipun Disertasi ini adalah tentang ilmu hukum.
11. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, yang telah menggugah penulis untuk tidak terlenan dengan pemikiran dogmatik yang melulu berkuat dengan kebenaran aturan hukum di dalam teks undang-undang yang belum tentu dapat membahagiakan manusia.
12. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, sekaligus narasumber Disertasi ini yang telah mendorong penulis untuk terus belajar dalam menelaah sistem hukum ekonomi Indonesia di tengah Globalisasi Ekonomi.
13. Para Penguji Proposal Disertasi, seminar hasil penelitian, penilaian kelayakan Disertasi yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis, khususnya Prof. Dr. Yusriadi, SH, MS, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MH, dan Dr. Nanik Trihastuti, SH, MH, dan Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi, SH, MH.
14. Para narasumber antara lain Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari Prof. Ir. Mukhtasor, Ph.D, Prof. Dr. Herman Agustiawan, Ir. Agusman Effendi, Prof. Widjajono Partowidagdo, Ph.D, Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., Ph.D, Ir. Eddi Widiono S, M.Sc, Prof, Dr, Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc; dan Kementerian ESDM yang terdiri dari Hufon Asrofi, SH, MH (Kepala Biro Hukum dan Regulasi Energi beserta staf); Sekretaris YLKI Tulus Abadi, SH; Pengadilan Tata Usaha Negara Maftuh Effendi, SH, MH, Teguh Satya Bhakti, SH, MH, dari pengamat kebijakan energi Dr. Kurtubi (*Center For Petroleum and Energy Economics Studies/CPEES*).

15. Para dosen PDIH UNDIP: Prof. Dr. Yusriadi, SH, MS, Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MH, Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS, Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS, Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH (Alm), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, M.Hum, Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, Prof. Soetandyo Wignyosoebroto (Alm), Prof. Liek Wilarjo, Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH, MH, yang telah mencurahkan ilmu secara ikhlas.
16. Rekan-rekan Angkatan XVII PDIH UNDIP khususnya Sdr. Maftuh Effendi, SH, MH sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang selama ini telah membantu penulis menuangkan beberapa ide dan hasil olah pikir ke dalam Disertasi, terutama hal-hal yang terkait dengan tema kewenangan pejabat administrasi negara.
17. Ayah, Ibu dan mertua serta Istriku yang telah berkorban jiwa, raga dan harta untuk mendukung sepenuh hati kepada penulis hingga studi doktoral di PDIH UNDIP ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya semoga disertasi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan dapat menghidupkan semangat hemat energi BBM serta menumbuhkan semangat juang di bidang hukum dan ekonomi.

Semarang, Agustus 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	xxxiii
KATA PENGANTAR	lviii
DAFTAR ISI	lxii
GLOSARI (<i>GLOSSARY</i>)	lxviii
DAFTAR SINGKATAN	lxxi
DAFTAR TABEL	lxxiv
DAFTAR RAGAAN	lxxvii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Fokus Studi&Permasalahan	12
2.1. Fokus Studi	12
2.2. Permasalahan.....	13
3. Kerangka Pemikiran.....	14
4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	23

4.1.Tujuan Penelitian	23
4.2.Kontribusi Penelitian.....	23
4.2.1. Kontribusi Teoretis.....	23
4.2.2. Kontribusi Praktis.....	24
5. Proses Penelitian	24
5.1.Titik Pandang/ <i>Stand Point</i>	24
5.2.Paradigma Penelitian	26
5.3.Metode Penelitian	29
5.3.1. Pendekatan Penelitian	29
5.3.2. Jenis Penelitian	32
5.3.3. Spesifikasi Penelitian	33
5.3.4. Jenis Data.....	33
5.3.5. Teknik Pengumpulan Data & Kasus.....	35
5.3.6. Teknik Analisis Data	37
5.3.7. Evaluasi, Teknik Pengecekan Keabsahan, dan Presentasi Data	39
6. Sistematika Penulisan	40
7. Orisinalitas Penelitian	45

BAB II PERLINDUNGAN HAK RAKYAT ATAS ENERGI DALAM PERSPEKTIF NILAI Keadilan Sosial DAN HUKUM PROGRESI.

1. Esensi Nilai Keadilan Sosial dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi.....	49
2. Makna Nilai Keadilan Sosial dalam Konteks Indonesia.....	60
3. Relasi Sistem Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Teori Analisis Keekonomian Tentang Hukum di Indonesia	70
3.1.Konsep Pilihan Rational.....	75
3.2.Konsep Nilai (<i>Value</i>)	77
3.3.Konsep Utilitas.....	79
3.4.Konsep Efisiensi	80
3.5.Konsep Monopoli.....	83
4. Melindungi Hak Rakyat Atas Energi dalam Perpektif Hukum Progresif	86

5. Sistem Hukum Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Perpektif Teori Bekerjanya Hukum Willian J. Chambliss dan Robert B.Seidman.....	97
6. Tekanan Globalisasi Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Energi Nasional.....	105
7. Pengaruh Liberalisasi Ekonomi Terhadap Bekerjanya Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Sybernitika-Talcott Parsons	115
8. Nilai Keadilan Sosial Sebagai Input Sekaligus Output Sistem Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Black Box Eastonian	123
9. Relasi Hak Rakyat Atas Energi dan Kapitalisme dalam Perpektif Faham Negara Kesejahteraan Indonesia.....	119
10. Bekerjanya Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Interaksionalis Simbolik.....	135
11. Bekerjanya Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Konflik, Ralf Dahrendorf	136
12. Relasi Hak Rakyat Atas Energi dan Kapitalisme dalam Perspektif Faham Negara Kesejahteraan Indonesia.....	139
13. Standarisasi Hukum Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat atas Energi di Tengah Globalisasi Ekonomi dalam Perspektif Teori Prismatic	145
14. Hak Rakyat Atas Energi dalam Perspektif Sistem Hukum Ekonomi Pancasila.....	155
15. Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Analisis Keekonomian Tentang Hukum	164
16. Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Subsidi	175
17. Analisis Kebijakan Subsidi BBM di Tengah Krisis Energi Global dan Dampaknya Terhadap Implementasi Hukum Energi Nasional.....	177
18. Implementasi Teori Subsidi Energi di Beberapa Negara.....	179
18.1.1. Iran	182
18.1.2. Arab Saudi	182
18.1.3. Rusia dan India	183
18.1.4. Venezuela.....	183
18.1.5. Malaysia.....	184

BAB III POTRET KONSTRUKSI REGULASI ENERGI NASIONAL
DALAM MELINDUNGI HAK RAKYAT ATAS
ENERGI BBM BERSUBSIDI DAN PRAKTIK LIBERALISASI
HARGA KEEKONOMIAN ENERGI BBM BERSUBSIDI

1. Potret Orientasi Perlindungan Hak Rakyat Atas Energi BBM	
Bersubsidi Berdasar Paradigma <i>Critical Legal Theory</i>	185
1.1. Perlindungan Hak Rakyat Atas Energi BBM dalam Sudut	
Pandang Konstitusi	194
1.2. Karakteristik Energi Bahan Bakar Minyak	197
1.2.1. Rumus Kimia dan Kandungan Minyak Bumi Sebagai	
Sumber Energi BBM	197
1.2.2. Industri Minyak Bumi dan Hasil Olahannya Di	
Indonesia	202
1.2.3. Pengaruh Perdagangan Minyak Global Terhadap	
Pengaturan Harga Energi Minyak Nasional.	204
1.2.4. Dampak Krisis Minyak Bumi Terhadap Penentuan	
Harga BBM	210
1.3. Menelisik Perbedaan Substansial Antara UU No. 8 Tahun 1971,	
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan	
UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi	213
1.4. Konstruksi Ideal dan Konstruksi “ <i>Existing</i> ” Sistem Hukum	
Energi Nasional	221
1.4.1. Konstruksi Ideal Sistem Hukum Energi Nasional	221
1.4.2. Konstruksi “ <i>Existing</i> ” Hukum Energi Nasional dalam	
Melindungi Hak Rakyat Atas Energi BBM	225
1.4.2.1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1960,	
Undang-undang No. 8 Tahun 1971 Serta	
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001	226
1.4.2.2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang	
Energi	232
1.4.2.3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2005,	
Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2005 dan	
Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2006	234
1.4.2.4. Permen ESDM No. 16 Tahun 2011 dan	

Perubahannya Permen No. 27 Tahun 2011, serta	
Permen No. 8 Tahun 2012	235
1.4.2.5.Peraturan Menteri ESDM No 23 tahun 2012 tentang	
Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula	
Harga Minyak Mentah Indonesia.	235
1.4.2.6.Keputusan MK Judicial Review UU Migas 2011 ...	236
2. Praktik Liberalisasi Harga Keekonomian Energi	
Bahan Bakar Minyak	237
2.1.Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	239
2.1.1. Visi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.....	241
2.1.2. Misi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	241
2.2.Dewan Energi Nasional	241
2.2.1. Sejarah Dewan Energi Nasional.....	241
2.2.2. Organisasi Dewan Energi Nasional	243
2.2.2.1.Pimpinan Dewan Energi Nasional	243
2.2.2.2.Anggota Dewan Energi Nasional	243
2.2.2.3.Visi Dewan Energi Nasional	244
2.2.3. Misi Dewan Energi Nasional	244
2.2.4. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional	244
2.3.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	245
2.3.1. Sejarah Pertambangan dan Energi	245
2.3.2. Visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	246
2.3.3. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	247
2.3.4. Tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	247
2.3.5. Fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ...	247
2.4.Pergeseran Bentuk Badan Usaha Milik Negara	
Pertamina Perseroan Sebagai Pintu Masuk Menghadapi	
Liberalisasi Harga Keekonomian Energi BBM di Tengah	
Globalisasi Ekonomi	248
2.4.1. Sejarah Singkat Berdirinya Pertamina	249
2.4.2. Dasar Peraturan	253
2.4.3. Tujuan Privatisasi, Tata Nilai, Agenda Transformasi	
dan Hasil Pencapaian PT. Pertamina (Persero)	254
2.4.3.1.Tujuan Privatisasi Pertamina (Persero)	254

2.4.3.2. Visi, Misi, Tata Nilai PT. Pertamina (Persero)	255
2.4.3.3. Agenda Transformasi dan Hasil Pencapaian PT. Pertamina (Persero)	256

BAB IV INSKONSISTENSI PERLINDUNGAN HAK RAKYAT ATAS ENERGI TERHADAP NILAI Keadilan Sosial dan DAMPAK PRAKTIK LIBERALISASI HARGA KEEKONOMIAN ENERGI BAHAN BAKAR MINYAK

1. Fungsi Bekerjanya Hukum Energi Nasional dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi BBM Bersubsidi Saat Ini	259
2. Kendala Implementasi Hukum Energi Nasional Tentang Pengaturan Harga Keekonomian Energi BBM Bersubsidi dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi	309

BAB V KONSTRUKSI BARU REGULASI ENERGI NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK RAKYAT ATAS ENERGI DI MASA DEPAN

1. Konstruksi Baru Regulasi Energi Nasional Terkait Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi di Masa Depan	338
1.1. Dinamika Perkembangan Regulasi Energi Nasional dan Perbandingannya dengan Regulasi Energi Malaysia Dan Beberapa Negara Lain	343
1.1.1. Regulasi Energi Bahan Bakar Minyak di Era Orde Lama ..	343
1.1.2. Regulasi Energi Bahan Bakar Minyak di Era Orde Baru	349
1.1.3. Regulasi Energi Bahan Bakar Minyak di Era Reformasi	354
1.1.4. Regulasi Bahan Bakar Malaysia dan Beberapa Negara Lain	362
2. Membangun Model Konstruksi Regulasi Energi Nasional Terkait Pengaturan Harga Keekonomian BBM Bersubsidi dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif di Masa Depan	364
3. Politik Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Chambliss dan Siedman	369

BAB VI PENUTUP

1. Simpulan	413
2. Implikasi Studi	416
2.1.Paradigmatik	416
2.2.Teoretis.....	417
2.3.Praktis.....	418
3. Rekomendasi.....	419

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INDEKS

GLOSARI (*GLOSSARY*)

Asas Efisiensi Berkeadilan: adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dalam melindungi hak rakyat atas energi dari tekanan gelombang globalisasi ekonomi dan liberalisasi harga sesuai pengaturan harga yang ditetapkan oleh pasar bebas, oleh karena itu pengaturan harga keekonomian energi bahan bakar minyak yang ekonomis dan terjangkau harga energi BBM harus tetap diatur dan dikuasai oleh negara sebagai regulator dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar atau para pelaku pasar guna tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Bahan Bakar Minyak: adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Dikuasai Negara: adalah kewenangan yang dimiliki dan tetap melekat kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan kewenangannya tersebut terhadap pengelolaan sumber-sumber energi BBM untuk mewujudkan kemakmuran rakyat berdasarkan keadilan sosial, adapun kewenangan tersebut meliputi: Merumuskan kebijakan (*beleid*), Melakukan pengurusan (*bestuur*), Pengaturan (*regelendaad*), Pengelolaan (*beheer*), dan Pengawasan (*toezichthoudendaad*) dan dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara harus melindungi agar cabang-cabang produksi tidak jatuh ke tangan orang perseorangan ataupun badan usaha supaya tidak terjadi penindasan kepada rakyat. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang perseorangan, termasuk kegiatan usaha hilir minyak bumi atau BBM harus tetap dikuasai negara, namun tidak diinterpretasikan bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondernemer*. Melainkan kekuasaan negara adalah kewenangan untuk membuat peraturan yang mendukung kelancaran kegiatan perekonomian, serta peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Energi: adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

Energi Tak Terbarukan: adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.

Harga Energi: adalah harga jual energi kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan sosial Pancasila.

Izin Usaha: adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (Vide Pasal 1 angka 20 UU Migas 2001)

Keadilan Sosial Pancasila: adalah keadilan sosial yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat banyak (makro) dibandingkan kepentingan dan keuntungan segelintir orang atau kelompok (mikro). Keadilan Sosial Pancasila menyangkut pembagian (keadilan distributif) sedangkan keadilan ekonomi adalah menyangkut kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), keadilan ekonomi disebut oleh Aristoteles sebagai keadilan komutatif. Keadilan ekonomi cenderung menimbulkan *free fight liberalism* yang lahir dan berkembang di negara-negara Eropa Barat abad 19 dan liberalis kapitalistik ala Amerika Serikat. Bila keadilan ekonomi yang berlebihan tidak diatur oleh negara sebagai bentuk campur tangan dan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, maka dikhawatirkan dapat melahirkan kesewenang-wenangan segelintir orang yang berkuasa dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu Pancasila menjabarkan makna keadilan sosial sebagai landasan pembangunan sistem perekonomian Indonesia ke dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), yaitu: (1) produksi diusahakan secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bentuk bangunan usaha yang sesuai adalah koperasi; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hanya perusahaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang boleh ada di tangan swasta; (3) bumi dan kekayaan alam termasuk energi BBM yang terkandung di dalamnya harus tetap dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kegiatan Usaha Hilir: adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.

Kegiatan Usaha Niaga Umum (*wholesale*): adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai dan mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*): adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas, bahan bakar lain, dan atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai

atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan atau terminal penerima (*receiving terminal*).

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak: adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak (BBM) di daerah tertentu dalam waktu tertentu.

Minyak Bumi: adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi (Vide Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Niaga: adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Pengolahan: adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pengangkutan: adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan: adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi.

Sumber daya energi: adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.

Sumber energi tak terbarukan: adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	:ASEAN Free Trade Area (AFTA)
AS	:AmerikaSerikat
BBM	:BahanBakarMinyak
Bcm	:Billion cubic meters
Bph	:Barrel per hari
Btu	:British Thermal Unit
Capex	:Capital Expenditure
CBM	:Coal Bed Methane
CIF	:Cost, Insurance and Freight
CRC	:Cost Recovery Ceiling
CT	:Contractor Take
DEN	:DewanEnergiNasional
DPR	:DewanPerwakilan Rakyat
Ditjen	:DirektoratJenderal
DMO	:Domestic Market Obligation
ECB	:Economic Commission Board
EOR	:Enhanced Oil Recovery

ETS	:Equity to be Split
FBP	:Fiscal Breakeven Price
FC	:Full Cost
FoB	:Free on Board
FTP	:First Trache Petroleum
GDP	:Gross Domestic Products
GECF	:Gas Exporting Countries Forum
GPW	:Gross Product Worth
GT	:Government Take
HEN	:Hukum Energi Nasional
ICP	:Indonesian Crude Price
IEA	:International Energy Agency
IEF	:International Energy Forum
IOC	:International Oil Company
IRR	:Internal Rate of Return
ITT	:Ishpingo- Tambococha- Tiputini
JCC	:Japan Crude Cocktail
JOA	:Joint Operating Agreement
KESDM	:Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KL	:Kilo Litter
KP	:Kyoto Protocol
KRG	:Kurdistan Regional Government
LCCA	:Limited Commercial Contract Area
LNG	:Liquefied Natural Gas
LPG	:Liquified Petroleum Gas
MK	:Mahkamah Konstitusi
MARR	:Minimum Attractive Rate of Return

MDTC	:Multi-Disciplinary Training Course
Migas	:Minyakdan Gas
NGL	:Natural Gas Liquid
NIOC	:National Iranian Oil Company
NOC	:National Oil Company
NPV	:Net Present Value
OAA	:Onerous Assignment Agreement
OECD	:Organisation for Economics Co-operation and Development
OPEC	:Organisation of the Petroleum Exporting Countries
PI	:Participating Interest
PIW	:Petroleum Intelligence Weekly
POD	:Plan of Development
PP	:PeraturanPemerintah
PSA	:Production Sharing Agreement
PSC	:Production Sharing Contract
RI	:Republik Indonesia
R/C	:Revenue/Cost
R/T	:Royalty/Tax
RM	:Refining Margin
RPJPMN	:Rencana Pembangunan JangkaMenengahNasional
RPJPN	:Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasional
SC	:Service Contract
SJP	:Strategijangkapanjang
Tcm	:Trillion cubic meter
Tcf	:Trillion cubic feet
TSA	:Technical Service Agreement
UK	:United Kingdom

US	:United State
UU	:Undang-Undang
WEO	:World Energy Outlook
WOO	:World Oil Outlook
WK	:WilayahKerja
WTI	:West Texas Intermediate
WTO	:World Trade Organization
WB	:World Bank

DAFTAR TABEL

Tabel.1: Rata-rata Pertumbuhan Produk Dumeistik Brutto Indonesia 2006-2013	5
Tabel.2: Pertumbuhan Produk Domestik Brutto Indonesia 1998-2013 Misi Dewan Energi Nasional	5
Tabel 3: Perkembangan Jumlah Permintaan Konsumsi dan Penawaran BBM di Indonesia Tahun 2006 – 2011 Misi Dewan Energi Nasional	9
Tabel 4 : Perkembangan Harga Eceran BBM di dalam Negeri Mulai Tahun 2003-2013 Misi Dewan Energi Nasional	10
Tabel 5: Persandingan Identifikasi Karakter Tiga Tipe Hukum dan Hukum Progresif Misi Dewan Energi Nasional.....	94
Tabel 6: Pemberlakuan Kebijakan Subsidi BBM di 25 Negara Tahun 2011 (Dalam miliar USDollar) Misi Dewan Energi Nasional.....	181
Tabel 7: Posisi Utama Posisi Empat Paradigma dan Beberapa Isu Praktisnya Misi Dewan Energi Nasional.....	186
Tabel 8: Kepercayaan Dasar (Metafisika) dari Empat Paradigma Misi Dewan Energi Nasional	188
Tabel 9: Komposisi Elemen Minyak Bumi Berdasarkan Berat Misi Dewan Energi Nasional	199

Tabel 10: Komposisi Molekul Minyak Bumi Berdasarkan Berat Misi Dewan Energi Nasional.....	199
Tabel 11: Hasil Penyulingan Minyak Bumi Misi Dewan Energi Nasional.....	202
Tabel 12: Negara-negara Produsen Minyak Bumi (Sumber: U.S. Energy Information Administration) Misi Dewan Energi Nasional	206
Tabel 13: Konsumsi Minyak Dunia oleh Masing-Masing Negara Setiap Hari Tahun 2008 (Sumber: Informasi Administrasi Energi AS) Misi Dewan Energi Nasional	207
Tabel 14: Negara Eksportir Minyak Bumi atau BBM Tahun 2006 s/d 2009 (Sumber: US Energy Information Administration) Misi Dewan Energi Nasional	208
Tabel 15: Negara importir minyak mentah terbesar, dari tahun 2006 sampai 2009 dalam ribu bbl/hari dan ribu m ³ /d (Sumber: US Energy Information Administration) Misi Dewan Energi Nasional	209
Tabel 16: Konsumen minyak mentah tapi tidak memproduksi (Sumber: CIA World Factbook) Misi Dewan Energi Nasional	210
Tabel 17: Persandingan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Misi Dewan Energi Nasional.....	218
Tabel 18: Beberapa hal perbedaan substansial antara UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan UU No. 8 Tahun 1971 Misi Dewan Energi Nasional.....	219
Tabel 19: Perbedaan Pengaturan Harga Keekonomian Energi BBM Misi Dewan Energi Nasional.....	220
Tabel 20: Konstruksi Politik Hukum Hak Mungasai Negara Atas Sumber Daya Alam.....	225
Tabel 21: Politik hukum energi Bahan Bakar Minyak saat ini Misi Dewan Energi Nasional	226
Tabel 22: Pengaturan Harga Energi Menurut UU No.30 Tahun 2007 Tentang Energi Misi Dewan Energi Nasional.....	234

Tabel 23: Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2005, Peraturan Presiden RI No.71 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2006 Misi Dewan Energi Nasional	234
Tabel 24: Permen ESDM No. 16 Tahun 2011 dan Perubahannya Permen 27 Tahun 2012, serta No.8 Tahun 2012 Misi Dewan Energi Nasional.....	235
Tabel 25: Keputusan MK Judicial Review UU MIGAS 2001 Misi Dewan Energi Nasional	236
Tabel 26: Sejarah Singkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Misi Dewan Energi Nasional	245
Tabel 27: Sejarah Singkat Pengusahaan Energi Minyak Bumi di Indonesia Misi Dewan Energi Nasional	249
Tabel 28: Politik Hukum Hak Menguasai Negara dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Sumber Energi BBM Sesuai Pasal 33 UUD Negara RI 1945 Misi Dewan Energi Nasional	264
Tabel 29: Cadangan Minyak Bumi Indonesia Misi Dewan Energi Nasional..	273
Tabel 30: Produksi Minyak Bumi Misi Dewan Energi Nasional	276
Tabel 31: Harga Minyak Bumi (2004-2011) Misi Dewan Energi Nasional....	277
Tabel 32: Daftar Nama Perusahaan Yang Telah Mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Misi Dewan Energi Nasional.....	278
Tabel 33: Produksi BBM 2004-2010 Misi Dewan Energi Nasional	282
Tabel 34: Konsumsi BBM & Non BBM (2005 – 2011) Misi Dewan Energi Nasional.....	283
Tabel 35: Impor BBM Menurut Jenisnya Misi Dewan Energi Nasional.....	283
Tabel 36: Proyeksi Energi Primer Indonesia Skenario Tanpa Konservasi Energi Misi Dewan Energi Nasional.....	296
Tabel 37:Proyeksi Energi Primer Indonesia Skenario Riken Misi Dewan Energi Nasional.....	296
Tabel 38: Keekonomian Harga BBM Misi Dewan Energi Nasional.....	297
Tabel 39: Periodisasi Pergerakan Sistem Hukum Dan Ekonomi di Indonesia Menurut Emil Salim Misi Dewan Energi Nasional	326
Tabel 40: Sasaran Ketahanan Energi tahun 2015-2019 Misi Dewan Energi Nasional.....	340

Tabel 41: Karakteristik Politik Hukum Energi Nasional Ideal dan Existing Misi Dewan Energi Nasional	408
Tabel 42: Konstruksi Baru Regulasi Energi Nasional Prismatik Berbasis Hukum Progresif Multidimensional Misi Dewan Energi Nasional.....	406

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1:Jenis-jenis Prinsip yang Mesti Dipilih Sebelum Konsep Lengkap Mengenai Hak Ditentukan Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Misi Dewan Energi Nasional.....	58
Ragaan 2: Pengukuran Ketidaksetaraan; Sumber: Richard A. Posner Misi Dewan Energi Nasional	78
Ragaan 3: Pengaturan harga berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, Sumber Richard A. Posner (1998, Ed. V.hlm. 8) Misi Dewan Energi Nasional	81
Ragaan 4:Bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman Misi Dewan Energi Nasional	101
Ragaan 5: Model Teori Legislatif, Proses Pembuatan Hukum Misi Dewan Energi Nasional.....	102
Ragaan 6: Sub-sub Sistem Dengan Fungsi Primernya dalam Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Energi Nasional Misi Dewan Energi Nasional	118
Ragaan 7: Model “Kotak Hitam” Eastonian Misi Dewan Energi Nasional.....	125/314
Ragaan 8: Pembentukan Hukum Di Tengah Konflik Kepentingan Global Misi Dewan Energi Nasional.....	132
Ragaan 9: Penjabaran nilai-nilai keadilan sosial Pancasila	

dalam sistem hukum Indonesia perspektif Teori <i>Stufenbau</i> atau Grundnorm Misi Dewan Energi Nasional	134
Ragaan 10: Model Prismatic Fred W. Riggs Misi Dewan Energi Nasional....	149
Ragaan 11: Tata Hukum Nasional Indonesia Berlandaskan Cita Hukum Pancasila Misi Dewan Energi Nasional	159
Ragaan 12: Kilang Dengan Konfigurasi sederhana Misi Dewan Energi Nasional	202
Ragaan 13: Kilang Dengan Konfigurasi Kompleks Misi Dewan Energi Nasional	203
Ragaan 14: Pengertian makna dikuasai oleh negara menurut Mahkamah Konstitusi Misi Dewan Energi Nasional	263
Ragaan 15: Penjabaran nilai-nilai keadilan sosial Pancasila dalam sistem hukum Indonesia perspektif Teori <i>Stufenbau</i> atau Grundnorm Misi Dewan Energi Nasional	268
Ragaan 16: Kondisi Existing (saat ini) Pengaturan Migas Misi Dewan Energi Nasional	270
Ragaan 17: Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia Misi Dewan Energi Nasional	273
Ragaan 18: Peta Lokasi Kilang Minyak Di Indonesia Misi Dewan Energi Nasional	245
Ragaan 19: Infrastruktur Migas Nasional Misi Dewan Energi Nasional	246
Ragaan 20: Regulasi Migas Misi Dewan Energi Nasional	293
Ragaan 21: Hubungan pemerintah sebagai regulator Migas dengan BUMN sebagai pelaksana kuasa usaha migas Misi Dewan Energi Nasional	295
Ragaan 22: Sub-sub Sistem Dengan Fungsi Primernya dalam Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Energi Nasional Misi Dewan Energi Nasional	304
Ragaan 23: Implementasi Model Teori Legislatif, Proses Pembuatan Hukum Misi Dewan Energi Nasional	307
Ragaan 24: Siklus dalam Permintaan (<i>demand</i>) BBM Sebagai Barang Publik Atau Privat Misi Dewan Energi Nasional	324
Ragaan 25: Dimensi Globalisasi Misi Dewan Energi Nasional	334
Ragaan 26: Model Prismatic Fred W. Riggs Misi Dewan Energi Nasional....	322
Ragaan 27: Perkembangan Harga BBM di Indonesia 1990 s.d. 2011	

Misi Dewan Energi Nasional	330
Ragaan 28: Kondisi BBM Bersubsidi 2011 Misi Dewan Energi Nasional	331
Ragaan 29: Pergeseran kedudukan peran NOC dalam penetapan harga energi BBM di beberapa negara Misi Dewan Energi Nasional ...	326
Ragaan 30: Politik Hukum Energi Nasional dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Chambliss dan Siedman Misi Dewan Energi Nasional	345
Ragaan 31: Transformasi Sosial dalam Pembuatan Produk Hukum David Easton Misi Dewan Energi Nasional.....	365
Ragaan 32: Model Konstruksi Baru Regulasi Energi Nasional BBM Prismatik Berbasis Hukum Progresif Multidimensional Misi Dewan Energi Nasional.....	369